



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG

DINAS KESEHATAN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023



<https://dinkes.kepahiangkab.go.id>



Jl. Bakti Husada No.06 Kelurahan
Pasar Ujung Kepahiang

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, serta pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis selama Tahun Anggaran 2023. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini menggambarkan pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, sehingga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menilai kinerja Dinas Kesehatan tahun 2023 serta dapat dijadikan dasar bagi pengambil keputusan di Dinas Kesehatan dalam menentukan langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua,... Aamiin.

Kepahiang, 10 Januari 2024
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEPAHANG,



H. TAJRI FAUZAN, SKM., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197001271989031001



IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, serta pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis, yang mengacu pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan tata cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Kesehatan tahun 2023 ini merupakan laporan kinerja tahun kedua atas pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Dinas Kesehatan. Laporan kinerja ini melaporkan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang.

Berdasarkan pengukuran kinerja *outcome*, rata-rata tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tahun 2023 sebesar **156,81% (Sangat Tinggi)** dan rata-rata tingkat capaian indikator kinerja sasaran sebesar **145,54% (Sangat Tinggi)** dari 4 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tahun 2023. Dari 4 indikator tersebut, seluruhnya (100,00%) melebihi/melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2023.

No	IKU	Indikator	% Capaian 2023	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	Meningkatnya status kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	Angka kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	180.59	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
		Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup	181.58	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	108.28	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian IKU			156.81	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan, rata-rata capaian kinerja keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 sebesar **95,25% (Sangat Tinggi)** dan capaian kinerja keuangan RSUD Kepahiang sebesar **96,53% (Sangat Tinggi)**. Dari 3 (tiga) sasaran strategis Dinas Kesehatan, sebanyak 2 sasaran capaian kinerja keuangannya kategori sangat tinggi dan 1 sasaran dengan kategori tinggi.

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Anggaran	% Capaian 2023	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
DINAS KESEHATAN						
1	Meningkatnya status kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	Angka kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup	1,283,649,972	80.98	76% ≤ 90%	Tinggi
2	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	21,664,066,688	91.28	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya kualitas administrasi, perencanaan dan pelaporan bidang kesehatan	Nilai SAKIP OPD	36,281,164,286	98.42	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
Capaian Kinerja Keuangan Dinkes			59,228,880,946	95.25	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
RSUD KEPAHIANG						
1	Mendukung sasaran 2	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	47,375,530,987	96.53	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
Total Capaian Kinerja Keuangan			106,604,411,933	95.81	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tahun 2023 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang selaku penerima amanah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Kepahiang.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
Kata Pengantar.....	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Grafik	x
Daftar Bagan.....	xi
Daftar Lampiran.....	xii
 BAB I Pendahuluan.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Dasar Pembentukan Organisasi.....	5
E. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
F. Aspek Strategis Organisasi	6
G. Isu Strategis	9
H. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	10
I. Sistematika Penulisan	13
 BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.....	 17
A. Rencana Strategis.....	17
B. Visi dan Misi.....	18
C. Tujuan dan Sasaran	20
D. Indikator Kinerja	21
E. Strategi dan Arah Kebijakan	29
F. Indikator Kinerja Utama (IKU)	31
G. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	32
H. Perencanaan Anggaran Tahun 2023	33

BAB III Akuntabilitas Kinerja	35
A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023.....	36
B. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023.....	37
C. Akuntabilitas Keuangan	70
BAB IV Penutup	81
Lampiran.....	85

DAFTAR TABEL

	HALAMAN
Tabel 1.1	Keadaan SDM Kesehatan dan Lainnya Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 12
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 2021-2026 18
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Menurut Program/Kegiatan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 22
Tabel 2.3	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026 29
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 31
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 32
Tabel 2.6	Anggaran dan Jumlah Program dalam mendukung Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 33
Tabel 2.7	Anggaran Per Program dalam mendukung Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 34
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 37
Tabel 3.2	Analisis Pencapaian Sasaran 1: Meningkatnya Status Kesehatan Ibu, Anak, dan Gizi Masyarakat Tahun 2023 Dibandingkan Capaian Tahun 2022 dan Target Akhir Renstra Tahun 2026 38
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Program yang Mendukung Pencapaian Sasaran I Tahun 2023 Dibandingkan Capaian Tahun 2022 dan Target Akhir Renstra Tahun 2026 46
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2023 yang Mendukung Pencapaian Sasaran I Dibandingkan Capaian Tahun 2022 dan Target Akhir Renstra Tahun 2026 47
Tabel 3.5	Analisis Pencapaian Sasaran 2: Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tahun 2023 Dibandingkan Capaian Tahun 2022 dan Target Akhir Renstra Tahun 2026 50

Tabel 3.6	Capaian Kinerja Program Tahun 2023 yang Mendukung Pencapaian Sasaran II Dibandingkan Capaian Tahun 2022 dan Target Akhir Renstra Tahun 2026.....	53
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2023 yang Mendukung Pencapaian Sasaran II Dibandingkan Capaian Tahun 2022 dan Target Akhir Renstra Tahun 2026.....	55
Tabel 3.8	Analisis Pencapaian Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Administrasi, Perencanaan dan Pelaporan Bidang Kesehatan Tahun 2023 Dibandingkan Capaian Tahun 2022 dan Target Akhir Renstra Tahun 2026.....	60
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Program Tahun 2023 yang Mendukung Pencapaian Sasaran III Dibandingkan Capaian Tahun 2022 dan Target Akhir Renstra Tahun 2026.....	66
Tabel 3.10	Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2023 yang Mendukung Pencapaian Sasaran III Dibandingkan Capaian Tahun 2022 dan Target Akhir Renstra Tahun 2026.....	66
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Sub Kegiatan Tahun 2023 yang Mendukung Pencapaian Sasaran III Dibandingkan Capaian Tahun 2022 dan Target Akhir Renstra Tahun 2026.....	68
Tabel 3.12	Ringkasan Realisasi Anggaran dalam Mendukung Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2023.....	70
Tabel 3.13	Anggaran dan Realisasi Keuangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Terkait Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2023	71
Tabel 3.14	Anggaran dan Realisasi Keuangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Terkait Pencapaian Kinerja Sasaran 2 Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2023	73
Tabel 3.15	Anggaran dan Realisasi Keuangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Terkait Pencapaian Kinerja Sasaran 3 Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2023	78



DAFTAR GRAFIK

HALAMAN

Grafik 2.1	Proporsi Anggaran Sektor Kesehatan di Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2023	
	Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Berdasarkan Perbup No 23 Tahun 2022	7



DAFTAR BAGAN

HALAMAN

Bagan 2.1	Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Berdasarkan Perbup No 23 Tahun 2022.....
	11



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kepahiang Tahun 2023
- Lampiran 2 *Cascading* Rencana Kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Kepahiang Tahun 2023



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Tahun 2023 dilakukan dalam rangka monitoring terhadap perjanjian kinerja. LKjIP merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKjIP.

Isu strategis (*strategic issued*) yang masih dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2023 diantaranya: Masih tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi; masih tingginya prevalensi stunting; transformasi pelayanan

kesehatan primer menuju penguatan dan peningkatan pelayanan yang komprehensif dan berkualitas serta penguatan pemberdayaan masyarakat; transformasi mutu pelayanan kesehatan; pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan Penyakit Tidak Menular (PTM); serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kebijakan di bidang kesehatan.

Untuk melihat sejauhmana pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan, maka dilakukan monitoring terhadap capaian kinerja sekaligus sebagai bahan dalam melakukan evaluasi. Dengan demikian Akuntabilitas Kinerja dapat terwujud sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Secara mekanisme, data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKjIP ini telah diyakini keandalannya, sebab setiap informasi telah didukung dengan data yang memadai bersumber dari hasil evaluasi masing-masing Bidang yang ada di Dinas Kesehatan baik evaluasi Triwulanan maupun evaluasi tahunan, dan telah melalui proses review/pembahasan bersama dalam menyusun kerangka analisis.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang menyusun Laporan Kinerja Tahunan yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan urusan perangkat daerah yang dicerminkan dari pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran strategis Dinas Kesehatan.

B. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih bebas dari Nepotisme;
- b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 154 tambahan lembaran Negara RI Nomor 4349);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Permenkes No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan;
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
- i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;

- j. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026;
- k. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang;
- l. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Nomor: 440/3685/ Kes.1.1 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sebagai perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.

2. Tujuan

- a. Memberikan gambaran kedudukan, tugas pokok, fungsi, aspek strategis organisasi, serta sumber daya yang dimiliki Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang;
- b. Memberikan gambaran isu strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2023;
- c. Memberikan gambaran perencanaan dan perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2023;
- d. Memberikan gambaran Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2023;
- e. Memberikan gambaran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2023;

- f. Memberikan gambaran Akuntabilitas Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2023.

D. Dasar Pembentukan Organisasi

Dasar pembentukan organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang adalah Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang.

E. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Kedudukan Dinas Kesehatan menurut pasal 202 Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 23 Tahun 2022 adalah:

- a. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan dengan tipologi B;
- b. Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam Kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang, Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kesehatan dan tugas lain yang diberikan Bupati.

Untuk melaksanakan tugas Pokok tersebut, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
- e. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

F. Aspek Strategis Organisasi

Aspek strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

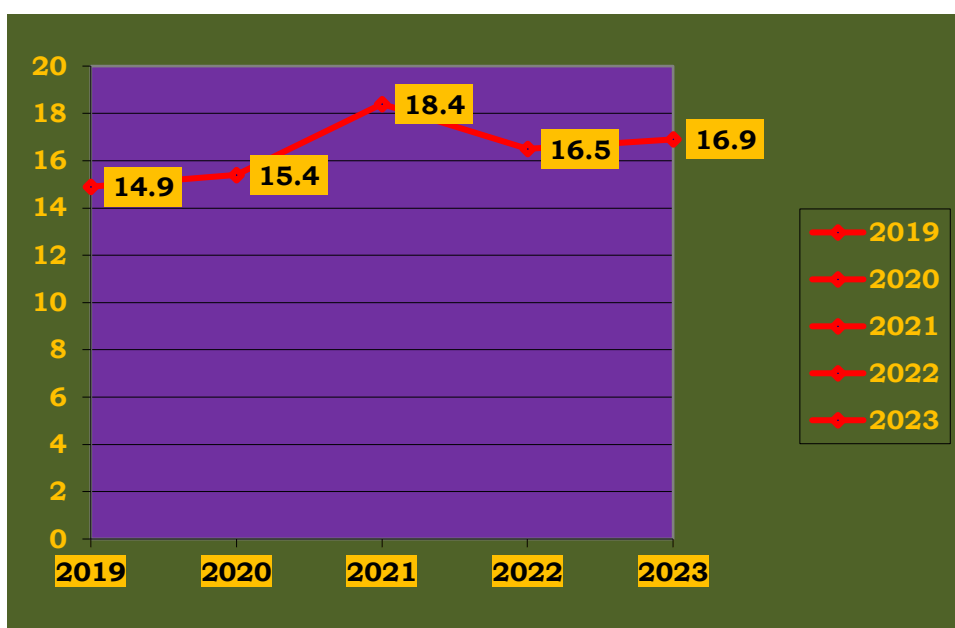
1. Aspek lingkungan internal

a. Pembiayaan Kesehatan

Sumber pendanaan kesehatan di Kabupaten Kepahiang berasal dari dana APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Jumlah anggaran sektor kesehatan yang bersumber APBD di Kabupaten Kepahiang (untuk Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit) tahun 2020 sebesar Rp.123.360.107.005,- atau sekitar 15,4% (termasuk gaji) dari total APBD Kabupaten Kepahiang Rp.801.651.868.668,36,-; pada tahun 2021 sebesar Rp. 143.717.471.474,- atau sekitar 18,4% (termasuk gaji) dari total APBD Rp.782.798.810.158,-; menurun menjadi 16,5% pada tahun 2022; dan meningkat kembali pada tahun 2023

sebesar Rp.127.789.759.442,- atau sekitar 16,87% (termasuk gaji) dari total APBD Rp.757.340.350.903,-. Persentase anggaran kesehatan sampai dengan tahun 2023 tampak pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.1
Proporsi Anggaran Sektor Kesehatan
di Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2023



Grafik di atas menggambarkan bahwa alokasi anggaran untuk sektor kesehatan sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari persentase alokasi anggaran untuk kesehatan (walaupun masih termasuk gaji) sudah di atas 10%, meskipun setiap tahunnya terlihat fluktuatif.

b. Sumber Daya Manusia

Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang merupakan pusat administrasi pelayanan kesehatan, mulai dari Kepala Dinas, pejabat Eselon III dan IV, staf dan pejabat fungsional. Pegawai dari Dinas Kesehatan tahun 2023 berjumlah 76 orang, yang terdiri dari Eselon II sebanyak 1 Orang, Eselon III sebanyak 4 Orang, Eselon IV sebanyak 2 orang, Fungsional

tertentu 23 orang, fungsional umum 24 orang, serta 22 orang tenaga THL.

c. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang sampai dengan Tahun 2023 diantaranya 1 RSUD, 14 Puskesmas, 31 Puskesmas Pembantu, 97 Poskesdes/Polindes, 118 Posyandu, 14 Puskesmas Keliling, 27 Rumah dinas Dokter/Perawat/Bidan, 6 Puskesmas Poned, 7 Toko obat, 15 Apotek, 21 praktek dokter umum, 4 praktek dokter gigi, 121 praktek bidan, 7 klinik pelayanan medis dasar, dan 1 klinik bersalin.

d. Perundangan/Aspek hukum

- 1) Adanya UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2) Adanya Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepahiang;
- 3) Adanya Peraturan Bupati Kepahiang tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang.

e. Organisasi/kelembagaan

Menggambarkan struktur Organisasi yang mampu mengakomodasi permasalahan kesehatan masyarakat.

2. Aspek lingkungan eksternal

a. Politik

- 1) Adanya komitmen dari Pimpinan daerah untuk peningkatan pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat;
- 2) Adanya komitmen yang tinggi dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan UHC;
- 3) Visi Pembangunan Kabupaten Kepahiang yaitu maju, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.

b. Ekonomi

Meningkatnya pendapatan Daerah memungkinkan adanya peningkatan pembiayaan kesehatan.

c. Sosial

Meningkatnya pengetahuan masyarakat berimplikasi terhadap kesadaran masyarakat pentingnya hidup sehat.

d. Lingkungan

Adanya kondisi lingkungan yang kondusif berupa infrastruktur memadai yang menunjang kegiatan pelayanan kesehatan.

G. Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari Isu strategis dari dinamika nasional dan regional yang mempengaruhi Kesehatan, serta Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah (RPJP dan RPJMD). Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan adalah kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan pada lima tahun mendatang.

Isu strategis yang masih dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2023 berdasarkan tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat adalah:

1. Masih tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi, sehingga diperlukan upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi;
2. Masih tingginya prevalensi stunting;
3. Transformasi pelayanan kesehatan primer menuju penguatan dan peningkatan pelayanan yang komprehensif dan berkualitas serta penguatan pemberdayaan masyarakat;
4. Transformasi mutu pelayanan kesehatan;

5. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan Penyakit Tidak Menular (PTM);
6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kebijakan di bidang kesehatan.

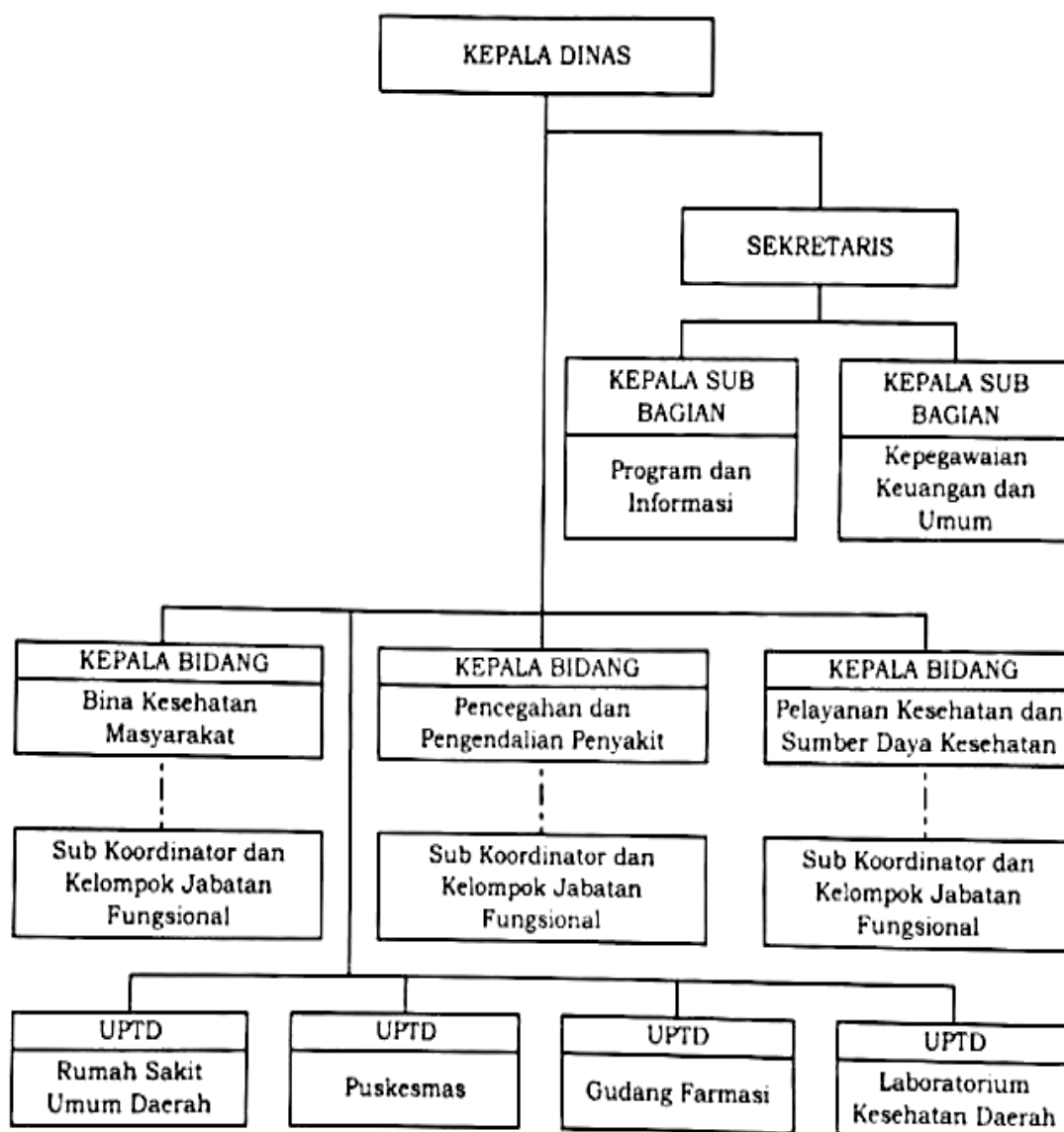
H. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang berdasarkan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, membawahi:
 - 1) Subbagian Program dan Informasi;
 - 2) Subbagian Kepegawaian, Keuangan dan Umum;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Unit Pelaksana Teknis terdiri dari:
 - 1) Rumah Sakit Umum Daerah;
 - 2) Puskesmas;
 - 3) Gudang Farmasi;
 - 4) Laboratorium Kesehatan Daerah
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang
Berdasarkan Perbup Nomor 23 Tahun 2022



2. Sumber Daya Manusia

Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang merupakan pusat administrasi pelayanan kesehatan, mulai dari Kepala Dinas, pejabat Eselon III dan IV, staf dan pejabat fungsional. Pegawai dari Dinas Kesehatan tahun 2023 berjumlah 76 orang, yang terdiri dari Eselon II sebanyak 1 Orang, Eselon III sebanyak 4 Orang, Eselon IV sebanyak 2 orang, Fungsional tertentu 23 orang, fungsional umum 24 orang, serta 22 orang tenaga THL.

Tabel 1.1
Keadaan SDM Kesehatan dan Lainnya
Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang
Tahun 2023

No	Jenis SDM	Dinkes Kab Kepahiang				Ket
		PNS	PPPK	Lainnya	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kepala Dinas Kesehatan	1	0	0	1	
2	Sekretaris	1	0	0	1	
3	Kepala Subbag Program dan Informasi	1	0	0	1	
4	Fungsional analisis Kebijakan	1	0	0	1	
5	Fungsional Umum	1	0	0	1	
6	Pengelola	0	0	2	2	
7	Kepala Subbag Kepegawaian, Keuangan dan Umum	1	0	0	1	
8	Fungsional Analisis Kepegawaian	1	0	0	1	
9	Penata Laporan Keuangan	1	0	0	1	
10	Fungsional Umum	7	0	0	7	
11	Pengelola	0	0	6	6	
12	Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat	1	0	0	1	
13	Fungsional Penyuluh	3	0	0	3	
14	Fungsional Adminkes	1	0	0	1	
15	Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja	2	0	0	2	
16	Nutrisionis	1	0	0	1	

17	Sanitarian	1	0	0	1	
18	Fungsional Umum	7	0	0	7	
19	Pengelola	0	0	4	4	
20	Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	1	0	0	1	
21	Fungsional Epidemiologi Kesehatan	5	0	0	5	
22	Fungsional Adminkes	1	0	0	1	
23	Fungsional Umum	5	0	0	5	
24	Pengelola	0	0	6	6	
25	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	1	0	0	1	
26	Fungsional Adminkes	3	0	0	3	
27	Fungsional Penyuluh	1	0	0	1	
28	Fungsional Umum	4	0	0	4	
29	Fungsional Perawat	2	0	0	2	
30	Pengelola	0	0	4	4	
Jumlah		54	0	22	76	

I. Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada bagian ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

B. Dasar hukum; memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan LKjIP.

C. Maksud dan tujuan; memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan LKjIP OPD.

D. Dasar pembentukan organisasi; memuat peraturan yang menjadi dasar pembentukan organisasi.

- E. Kedudukan, tugas pokok dan fungsi; memuat tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.
- F. Aspek strategis organisasi, memuat aspek strategis Dinas Kesehatan yang mencakup aspek lingkungan internal dan eksternal.
- G. Isu Strategis; memuat Isu strategis yang masih dihadapi oleh Dinas Kesehatan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat.
- H. Struktur organisasi dan sumber daya manusia; memuat struktur organisasi Dinas Kesehatan dan sumber daya manusia.
- I. Sistematika penulisan; menguraikan pokok bahasan dalam penulisan LKjIP OPD, serta susunan garis besar isi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Memuat rencana strategis Dinas Kesehatan, serta kaitannya dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah Tahun 2021-2026.

B. Visi dan Misi

Memuat Visi dan Misi Dinas Kesehatan yang tercantum dalam Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026

C. Tujuan dan Sasaran

Memuat tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang.

D. Indikator Kinerja

Memuat indikator dan target kinerja sasaran strategis/program/kegiatan tahun 2023.

E. Strategi dan arah kebijakan

Memuat tentang tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan strategi Perangkat Daerah

F. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Memuat indikator kinerja utama Dinas Kesehatan yang ingin dicapai selama tahun 2023.

G. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Memuat perjanjian kinerja yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan yang mempunyai jangka waktu satu tahun berjalan. Dalam perjanjian kinerja tersebut tertuang target yang akan dicapai dalam satu tahun berjalan.

H. Perencanaan Anggaran Tahun 2023

Memuat jumlah anggaran yang ditetapkan pada setiap sasaran dalam kaitannya mendukung pencapaian sasaran, termasuk jumlah program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian masing-masing sasaran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023

Pada sub bab ini disajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

B. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023.

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (Renstra) yang terdapat dalam dokumen Renstra Dinas Kesehatan;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang akan dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dinas Kesehatan memiliki tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang di bidang kesehatan dan diharapkan mampu mendukung terwujudnya Visi dan Misi Bupati Kabupaten kepahiang khususnya yang berhubungan dengan kesehatan. Dinas kesehatan juga dituntut untuk berpandangan jauh kedepan dan berusaha meningkatkan kualitas agar lebih profesional dalam berbagai upaya pembangunan kesehatan.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Nomor: 440/3685/ Kes.1.1 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026.

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang, maka telah ditetapkan indikator kinerja di dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH)	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	68,02	68,17	68,31	68,45	68,6
		Meningkatnya status kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	per 100.000 KH	168	152	138	126	114
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	per 1.000 KH	13,86	12,22	10,42	9,15	8,04
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	77	80	87,5	88,4	89,30
		Meningkatnya kualitas administrasi, perencanaan dan pelaporan bidang kesehatan	Nilai Sakip OPD	Nilai	B	B	B	B	B

Sumber: Dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang 2021-2026.

B. Visi dan Misi

Dalam Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 tidak ada Visi Misi Dinas Kesehatan, tetapi mengikuti visi Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang periode 2021-2026 **“Mewujudkan Kepahiang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing”** yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut melalui 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Kepahiang tahun 2021-2026, yaitu:

- 1. Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Kepahiang yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan.**
- 2. Meningkatkan efektifitas daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi memulai pengembangan kapasitas birokrasi yang profesional dan akuntabel, percepatan layanan publik, peningkatan kualitas demokrasi dan penegakan supremasi hukum.**
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur. Upaya ini dilakukan melalui percepatan penyediaan infrastruktur yang mampu mendukung perkembangan kegiatan ekonomi, social dan budaya masyarakat.
4. Mengembangkan perekonomian Kabupaten Kepahiang yang berdaya saing, berkeadilan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan upaya ini dilakukan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyediaan informasi, fasilitas dan intermediasi perbankan bagi koperasi dan usaha kecil menengah.
5. Mendorong peningkatan penerimaan pajak dan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) serta meningkatkan penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah lainnya.

Misi 1 Kabupaten Kepahiang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Kepahiang, dengan sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Kepahiang. Sedangkan misi 2 bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan, dengan sasaran yang akan dicapai meningkatnya kualitas pelayanan publik, yang dilaksanakan melalui strategi meningkatkan kualitas pelayanan publik akuntabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk melaksanakan visi Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang periode 2021-2026 serta mendukung **misi I** dan **misi II** tersebut, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang telah menjabarkan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat;
2. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatkan Kualitas Administrasi, Perencanaan dan Pelaporan Bidang Kesehatan;

Ketiga penjabaran misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis. Masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan mempunyai indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur tingkat ketercapaiannya.

C. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Untuk melaksanakan visi Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang periode 2021-2026 **“Mewujudkan Kepahiang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing”** yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026, serta Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang menetapkan tujuan strategis yaitu **“meningkatnya kesehatan masyarakat, dengan Umur Harapan Hidup (UHH) sebagai indikator”**.

2. Sasaran Strategis

Berdasarkan penjabaran Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 yang telah disebutkan di atas, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang menetapkan sasaran strategis 2021-2026 sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat;
2. Sasaran 2: Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat;
3. Sasaran 3: Meningkatnya kualitas administrasi, perencanaan dan pelaporan bidang kesehatan.

D. Indikator Kinerja Menurut Program/Kegiatan Tahun 2023

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang yang ditetapkan telah selaras antar tingkatan unit organisasi di Dinas Kesehatan. Indikator kinerja yang digunakan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang juga telah memenuhi kriteria **SMART-C**: spesifik (*Specific*), dapat diukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Achievable*), memungkinkan untuk dicapai (*Realistic*), indikator dapat dicapai dalam priode waktu tertentu (*Time-bounded*), serta indikator mendorong peningkatan kinerja organisasi (*Continuous-Improvement*). Sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Menurut Program/Kegiatan Rencana Kinerja Tahunan
Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2023

No	Sasaran Kada/Sasaran OPD/Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Kada/Sasaran OPD/Program	Target 2023	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2023
A	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Angka Harapan Hidup (AHH)	68,17				
1	Meningkatnya status kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat		1. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	152				
			2. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	12,22				
1)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas kesehatan ibu, anak, dan gizi masyarakat	Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	<11,9%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya penyediaan Layanan Kesehatan pada ibu, anak, dan gizi masyarakat	Persentase ibu hamil resti yang ditemukan dan ditangani sesuai standar	78.37%
							Persentase WUS (15-39) yang memiliki status imunisasi T2+	80%
							Jumlah calon pengantin yang mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi	736
							Persentase remaja putri yang mengkonsumsi tablet tambah darah	75%
							Persentase ibu bersalin di puskesmas	15.11%
							Persentase ibu bersalin resti yang dirujuk terencana	76%
							Persentase bayi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	94.27%
							Persentase balita dengan status gizi yang diintervensi	100%
							1. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang	94.02
			Persentase ibu bersalin di faskes (Pf)	100%				
			Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan Mendapat Asi Eksklusif	79,7%				
			Prevalensi Wasting (Kurus dan Sangat Kurus) Pada Balita	4,3%				
			Persentase balita dengan status gizi BB/U kurang dan sangat kurang yang meningkat berat badannya	75%				
			Persentase Puskesmas mencapai target imunisasi rutin	92				

						mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	
						2. Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	80
						3. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat antigen baru	94.02
						4. Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan baduta	94.02
			Jumlah Kabupaten Germas	1		Jumlah puskesmas yang melaksanakan pembinaan ke sekolah 4 kali setahun	9
						Persentase anak yang mendapatkan imunisasi lanjutan lengkap di usia sekolah dasar	95
						Jumlah Kampanye GERMAS	4
						Jumlah Pos UKK di wilayah kerja Puskesmas yang sudah dilakukan pembentukan, pengawasan, dan pembinaan	26
						Jumlah Pekerja Formal yang dilakukan Test kebugaran	560
						Jumlah skrining kesehatan yang dilakukan di Tempat kerja	55
						Persentase puskesmas yang melakukan pelayanan Akupresure	28.60%
			Persentase lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan	90.46		Jumlah lansia beresiko (hasil screening) yang diintervensi : jumlah yang diintervensi/ jumlah yg beresiko	291
			Persentase Puskesmas yang melaksanakan intervensi kesehatan keluarga	100		Jumlah Posyandu Prima Terbentuk	17
			Persentase Standar kualitas kesehatan lingkungan	60%		jumlah TFU yang memenuhi standar	45
						Jumlah sarana air minum dengan kualitas air minum sesuai standar	21

							Persentase RS yang melaksanakan penyelenggaraan kesehatan lingkungan	100%
							Jumlah desa/kelurahan SBS	70
2)	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Persentase TPP yang memenuhi standar	44.66
					Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Persentase DAMIU yang memenuhi standar	23.07
3)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan	Persentase Posyandu Aktif	80%	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya upaya edukasi dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui UKBM	Jumlah Kemitraan	10
					Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
					Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah UKBM Aktif	121
2	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80.00				
1)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas bagi masyarakat	Persentase Puskesmas dengan SPA sesuai dengan standar	55%	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang mempunyai SPA sesuai Standar	11
							Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	78.57
							Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial	100.00
							nilai ITOR sesuai standar	12
			Persentase Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan sesuai standar	72%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan primer yang berkualitas	Jumlah Pelayanan Rujukan Dasar sesuai standar	6
							Jumlah Faskes dengan jenjang Akreditasi Meningkatkan	5

							Persentase Pelayanan Laboratorium dasar sesuai standar	83.33
							Jumlah Pembinaan Rumah Sakit dan Labkesda	2
							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan khusus	4
					Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya mutu penyedia layanan kesehatan	Persentase peningkatan mutu pelayanan faskes	57.14
							Persentase Rekomendasi Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	100.00
2)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Persentase tenaga kesehatan sesuai standar	60%	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tenaga kesehatan yang memiliki izin praktik	Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan rekomendasi ijin praktek	550
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi teknis	Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi teknis sesuai standar	550
			Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	79%	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terwujudnya penyediaan 9 jenis tenaga yang dipersyaratkan di Puskesmas	Jumlah Puskesmas memiliki 9 Jenis Tenaga	11
			Persentase Rumah Sakit dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100				
3)	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya kualitas pelayanan dan sediaan kefarmasian	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek, Toko Obat, Optik & UMOT) Yang Memenuhi Standar	66.67	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah apotek, Toko Obat, Optikal, dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mendapat pengawasan dan pembinaan	24
			Persentase pengawasan pre dan post market pangan industri rumah tangga sesuai s	52.52	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		persentase sarana IRT yang memenuhi ketentuan	30.77
					Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		persentase pangan IRT yang memenuhi syarat	75.00
4)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Terpenuhinya pembiayaan kesehatan pada kegiatan	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Pemerintah	71.00%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyiapan implementasi	Jumlah Penduduk memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Peserta PBI	108,000

	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	promotif dan preventif dalam mencapai UHC				pembiayaan dan jaminan kesehatan		
5)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular	Persentase usia produktif yang ditindak lanjuti	89%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya penyediaan Layanan Kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular	jumlah usia produktif yang memiliki faktor resiko PTM prioritas	8,106
			Prevalensi Hipertensi	34.00%			persentase penderita hipertensi yang terkendali tekanan darahnya	10%
			Prevalensi Diabetes Melitus	1.00%			persentase penderita diabetes melitus yang terkendali gula darahnya	10%
			Cakupan layanan upaya kesehatan jiwa masyarakat	100%			persentase penyandang gangguan jiwa yang memperoleh layanan kesehatan jiwa	80%
			Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC	90%			Persentase Penemuan Kasus TBC	90%
			persentase total kasus hiv yang di obati	100%			jumlah penemuan dan pengobatan kasus baru yang ditemukan dan diobati HIV (ODHA on ART)	10
			Persentase Fasyankes yang melakukan respons KLB/wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tatalaksana kasus)	40%			Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi Surveilans Berbasis Digital	40%
			Persentase Calon Jemaah Haji yang mendapatkan Rekomendasi Istitohah Haji	100			Persentase Spesimen yang adekuat	100%
			Persentase penyakit menular pada balita	60%			Persentase Jemaah Haji yang mendapatkan Pelayanan kesehatan sesuai standar	100
							jumlah pengobatan kasus penemoni sesuai standar	229
							jumlah pengobatan kasus diare sesuai standar	2287
							jumlah popupasi beresiko yang dilakukan screening hepatitis B atau C	2731
							Jumlah kasus kusta baru tanpa cacat	2
							Persentase kabupaten yang mempunyai IR DBD ≤ 10 per 100.000 penduduk	100%
							Jumlah penyakit tropis terabaikan	14
			Persentase Penemuan dan pengobatan Penyakit Hepatitis	100%				
			Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tular Vektor dan Zoonotik	100%				

							Jumlah suspek malaria yang ditemukan	140
							Jumlah Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) yang ditindaklanjuti	100
3	Meningkatnya kualitas administrasi, perencanaan dan pelaporan bidang kesehatan		Nilai Sakip OPD	B				
1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas manajemen dan dukungan teknis Dinas Kesehatan	Persentase dokumen SAKIP	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun secara lengkap	18
			Persentase Dokumen Kepegawaian, Keuangan, dan Umum	100			Persentase administrasi keuangan yang sesuai standar	100%
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja Keuangan yang berkualitas	43
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Dokumen Dokumen Penatausahaan/ pembinaan/pengawasan dan pengendalian barang milik daerah	6
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian	90%
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yg tersedai	100
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang Dinas Kesehatan	100

					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang perkantoran yang layak pakai	100
2)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terselenggaranya sistem informasi kesehatan yang berkualitas	Persentase Puskesmas dengan Pengelolaan data dan Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi	100%	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	Jumlah Dokumen Data dan Sistem Informasi yang terintegrasi	3

E. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan, mengacu kepada bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan mengacu kepada strategi RPJMD Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang tertuang dalam Misi I dan Misi II. Strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026

Visi :	“Mewujudkan Kepahiang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing”		
Misi 1 :	Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Kepahiang yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan.		
Misi 2 :	Meningkatkan efektifitas daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi memulai pengembangan kapasitas birokrasi yang profesional dan akuntabel, percepatan layanan publik, peningkatan kualitas demokrasi dan penegakan supremasi hukum.		
Tujuan PD	Sasaran PD	Arah Kebijakan PD	Strategi PD
Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Sasaran 1: Meningkatkan status kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	Menguatkan pelayanan kesehatan dasar (<i>Primary Health Care</i>) melalui penyediaan pelayanan kesehatan primer yang berkualitas	1. Transformasi pelayanan kesehatan primer melalui Posyandu Prima menuju penguatan dan peningkatan pelayanan yang komprehensif dan berkualitas serta penguatan pemberdayaan masyarakat 2. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, usia produktif dan Usia Lanjut sesuai standar dengan pendekatan <i>continuum of care (CoC)</i> ; 3. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan;

			4. Penguatan Puskesmas melalui peningkatan pelayanan Gizi Masyarakat 5. Penguatan dan perluasan upaya edukasi dan pemberdayaan masyarakat, termasuk untuk peningkatan peran aktif dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat; 6. Penguatan UKBM, pendekatan keluarga dan pelibatan swasta dalam upaya pengendalian penyakit berbasis masyarakat; 7. Peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi rutin.
	Sasaran 2: Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Menguatkan sistem kesehatan dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta	1. Transformasi pelayanan kesehatan rujukan dalam rangka penyediaan layanan rujukan yang lebih berkualitas; 2. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan yang mencakup obat, alat kesehatan, sarana dan prasarana dan aspek layanan lainnya; 3. Upaya pemenuhan Sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) secara berkelanjutan; 4. Pemenuhan Obat, BMHP, dan vaksin; 5. Transformasi SDM kesehatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan yang kompeten, merata serta berkeadilan, sehingga tidak ada lagi puskesmas yang tanpa dokter; 6. Peningkatan kemudahan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas; 7. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
			8. Penguatan cakupan deteksi dini, pencegahan faktor resiko dan tata laksana kasus Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular (PTM); 9. Penguatan kapasitas surveilans dengan membangun kapasitas surveilans <i>real-time</i>; 10. Penguatan deteksi dini penyakit berdasarkan faktor risiko sesuai dengan kelompok usia; 11. Peningkatan kapasitas penemuan kasus baru penyakit menular; 12. Pengendalian penyakit berbasis masyarakat melalui UKBM, pendekatan keluarga dan pelibatan swasta.
	Sasaran 3: Meningkatnya kualitas administrasi, perencanaan dan pelaporan bidang kesehatan	Penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik	1. Peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan 2. Peningkatan sinergi antara Dinas Kesehatan dan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan urusan kesehatan; 3. Penguatan kinerja pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan tugas

			pokok dan fungsinya pada bidang kesehatan; 4. Penguatan kapasitas perencanaan, pemrograman dan penganggaran oleh Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang kesehatan.
--	--	--	--

Sumber: Dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang 2021-2026

F. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Nomor: 440/1307/Kes 1.1 tentang Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2023

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Formulasi (Cara Perhitungan)
1	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya status kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	1. Angka kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH 2. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000	1. Jumlah Kematian Ibu / Jumlah Kelahiran Hidup x 100.000 2. Jumlah Kematian Bayi / Jumlah Kelahiran Hidup x 1000
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah rata-rata hasil SKM 14 Puskesmas + hasil SKM RSUD + hasil SKM Dinkes + Labkesda / 4 X 100.

Sumber: Dokumen IKU Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang 2023.

G. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja yang diterapkan di Instansi Pemerintahan adalah perjanjian yang mempunyai jangka waktu satu tahun berjalan. Perjanjian Kinerja juga sebagai tekad dan janji dari rencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi karena memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Rencana kinerja berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program/kegiatan akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kesehatan tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya status kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	12,22
		Angka kematian Ibu per 100.000 Kelahiran hidup	152
2	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80%
3	Meningkatnya kualitas administrasi, perencanaan dan pelaporan bidang kesehatan	Nilai SAKIP OPD	B

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang 2023.

H. Perencanaan Anggaran Tahun 2023

Dari 3 (tiga) sasaran dengan 4 indikator yang diperjanjikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tersebut, didukung oleh 5 program, 23 kegiatan, dan 70 sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja, serta didukung oleh anggaran sebesar Rp. 62,182,228,720.00.

Tabel 2.6
Anggaran dan Jumlah Program dalam mendukung Sasaran
Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang
Tahun 2023

No	Sasaran	Jumlah Program yang Terkait langsung dengan Sasaran	Jumlah Kegiatan yang Terkait langsung dengan Sasaran	Jumlah Sub Kegiatan yang Terkait langsung dengan Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2023	Ket
1	Sasaran 1	3	6	15	1,585,094,300	Jumlah Program ada 5, tetapi Program Pemenuhan UKP dan UKM terkait langsung dengan pencapaian ke-3 sasaran tersebut
2	Sasaran 2	3	9	32	23,734,215,098	
3	Sasaran 3	2	9	23	36,862,919,322	
	Jumlah	8	24	70	62,182,228,720	

Sumber data: Dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang 2023.

Sedangkan rencana kerja anggaran per masing-masing program baik Dinas Kesehatan maupun Rumah Sakit dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.7
Anggaran Per Program dalam mendukung Sasaran
Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang
Tahun 2023

No	Program	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	Total
A	Dinas Kesehatan	28,173,119,298	34,009,109,422	62,182,228,720
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	2,767,969,900	34,009,109,422	36,777,079,322
2	Program Pemenuhan UKP dan UKM	23,758,971,398		23,758,971,398
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	799,368,600		799,368,600
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	763,847,400		763,847,400
5	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	82,962,000		82,962,000
B	RSUD	29,972,978,893	19,106,250,659	49,079,229,552
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	28,276,517,350	19,106,250,659	47,382,768,009
2	Program Pemenuhan UKP dan UKM	1,696,461,543		1,696,461,543
	Total Anggaran	58,146,098,191	53,115,360,081	111,261,458,272

Sumber data: Dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang 2023.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Kesehatan selaku pelaksana sebagian kebijakan pemerintah daerah harus melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*). Indikator kinerja sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator

kinerja sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam laporan ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Nomor: 440/1307/Kes 1.1 tentang Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya status kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	Angka kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	100.000 KH	152	84.17	180.59	Melebihi Target
			Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 KH	1000 KH	12.22	6.73	181.58	Melebihi Target
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Persen	80	86.62	108.28	Melebihi Target
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR UTAMA (IKU)							156.81	

Sumber data: Dokumen Evaluasi Rencana Kerja Dinkes Kab. Kepahiang 2023.

B. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023

Secara umum Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026 sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2023 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan. Dari 3 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja yang ditetapkan, pencapaian kinerja per masing-masing sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang sebagai berikut:

B.1 Sasaran 1: Meningkatkan Status Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi Masyarakat.

Tabel 3.2
Analisis Pencapaian Sasaran 1: Meningkatkan Status Kesehatan Ibu, Anak, dan Gizi Masyarakat Tahun 2023 Dibandingkan Capaian Tahun 2022 dan Target Akhir Renstra Tahun 2026

No	Sasaran 1	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2023	Realisasi			Target Akhir Tahun Renstra (2026)	Kesenjangan Terhadap Renstra	Realisasi Anggaran			Efisiensi
					Tahun 2022	Tahun 2023	% Capaian 2023			Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya status kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	Angka kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	100.000 KH	152	168.13	84.17	180.59	114	29.83	1,585,094,300	1,283,649,972	80.98	100,10
		Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup	1000 KH	12.22	10.82	6.73	181.58	8.04	1.31				
Jumlah							181.081					80.98	100.10

Sumber data: Dok Evaluasi Renja Bidang Binkesmas Dinkes Kab. KPH 2023.

Angka kematian ibu (*maternal mortality rate*) dan angka kematian bayi (*infant mortality rate*) merupakan indikator sensitif untuk mengukur keberhasilan pencapaian pembangunan kesehatan, dan juga sekaligus mengukur pencapaian indeks modal manusia. Pemerintah telah menetapkan penurunan angka kematian ibu sebagai *major project*, yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien. Jumlah indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur meningkatnya status kesehatan ibu, anak, dan gizi masyarakat sebanyak 2 indikator, sebagai berikut:

1. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH.

Kematian Ibu adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan

karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Cara perhitungannya adalah Jumlah Kematian Ibu/Jumlah Sasaran Kelahiran Hidup x 100.000.

Tabel 3.2 di atas terlihat bahwa capaian indikator Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2023 sebesar 84,17/100.000 KH (atau sebanyak 2 kematian) telah melebihi target tahun 2023 yang direncanakan yaitu sebesar 152/100.000 KH, bahkan telah melebihi target akhir renstra yang ditetapkan sebesar 114/100.000 KH. Capaian tersebut juga meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu 168,13/100.000 KH (atau sebanyak 4 kematian) dan telah berada jauh lebih rendah dari target nasional AKI yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 194/100.000 KH.

Berdasarkan penyebab langsungnya, 2 (dua) kematian ibu yang terjadi pada tahun 2023 di Kabupaten Kepahiang disebabkan 1 orang karena sebab hipokalemia dan 1 orang karena emboli air ketuban. Sedangkan penyebab 4 kematian ibu pada tahun 2022 yaitu 1 orang karena sebab perdarahan, 1 orang hipokalemia, 1 orang COVID-19, dan 1 orang hipertensi.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Kepahiang diantaranya:

- a. Mendekatkan akses pelayanan kesehatan ibu hamil sampai ke tingkat desa, dimana pada tahun 2023 telah dibentuk Posyandu ILP (Integrasi Layanan Primer) di 17 desa lokus yang tersebar di masing-masing puskesmas dan 3 desa lokus Kabupaten. Di setiap desa lokus, Dinas Kesehatan telah menempatkan tenaga kesehatan yaitu 1 bidan dan 1 perawat, serta 8 orang kader yang sudah dilatih yang mempunyai tugas melaksanakan pendataan keluarga melalui kunjungan rumah;

b. Menerbitkan Petunjuk Teknis (Juknis) Inovasi MBK RESTI (Monitoring Berkala Ibu Hamil Resiko Tinggi), untuk mengarahkan pelaksanaan dan pedoman bagi tenaga kesehatan dalam melakukan monitoring ibu hamil resiko tinggi agar lebih sistematis dan terarah terhadap tujuan yang telah ditetapkan.

c. Meningkatkan capaian UHC (*Universal Health Coverage*).

Upaya tersebut juga didukung oleh beberapa faktor yang menjadi penguat/pendorong menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2023 di Kabupaten Kepahiang diantaranya:

- a. Meningkatnya persentase ibu bersalin di Faskes (Pf), dari 81,06% pada tahun 2022 menjadi 86,61% pada tahun 2023;
- b. Meningkatnya persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar, dari 74,55% pada tahun 2022 menjadi 80,91% pada tahun 2023;
- c. Meningkatnya persentase ibu hamil resti yang ditangani sesuai standar, dari 77,82% pada tahun 2022 menjadi 79,37% pada tahun 2023;
- d. Meningkatnya persentase posyandu aktif, dari 81,82% pada tahun 2022 menjadi 100% pada tahun 2023;
- e. Meningkatnya persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Pemerintah, dari 70,69% pada tahun 2022 menjadi 155% pada tahun 2023.

Disamping itu terjadi peningkatan capaian dibandingkan dengan tahun 2022 tersebut didukung oleh beberapa faktor diantaranya: 14 puskesmas sudah tersedia 14 USG dan 14 dokter yang sudah dilatih tentang workshop USG; pelayanan ibu hamil sudah wajib 6 kali pemeriksaan yang dilakukan di puskesmas atau di desa; sebanyak 936 kader posyandu se Kabupaten Kepahiang telah dilatih untuk memberikan edukasi terhadap ibu

hamil; adanya program kunjungan rumah oleh kader kesehatan terhadap keluarga beresiko; adanya program kelas ibu hamil di setiap posyandu; serta adanya bantuan dana desa untuk PMT ibu hamil.

Walaupun berbagai upaya dan faktor pendorong tersebut telah berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Kepahiang pada tahun 2023, namun masih terdapat beberapa faktor penghambat yang ditemui seperti: 1). belum dibuatnya regulasi tentang pelayanan PONEID di puskesmas PONEID dan Non PONEID; 2). faktor dari pelayanan kesehatan di desa masih ada bidan desa yang belum optimal melaksanakan tugas di desa tempat tugasnya; 3). faktor perangkat desa, setiap penggantian kepala desa selalu ada perubahan terhadap kader kesehatan yang telah dibina dan dilatih, sehingga kader baru belum mendapat kecakapan dalam memberikan edukasi ke ibu hamil dan masyarakat dalam peningkatan pengetahuan tentang kehamilan; 4). faktor ibu hamil baru, dimana ibu hamil baru yang belum ada pendamping yang memahami pengetahuan masalah ibu hamil, sehingga ibu hamil baru belum paham akibat dari kehamilannya.

Efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan dalam mendukung capaian tersebut diantaranya: 1). dengan melakukan efisiensi anggaran, dimana rata-rata persentase capaian kinerja untuk sasaran 1 ini sebesar 181,08% sedangkan penyerapan anggarannya sebesar 80,98%, sehingga diperoleh nilai efisiensi penggunaan anggaran pencapaian sasaran 1 mencapai 100,10%; 2). efisiensi terhadap SDM, dengan melatih 14 dokter tentang workshop USG dan kader kesehatan yang ditempatkan di desa; dan 3). Penyediaan USG di 14 Puskesmas untuk meningkatkan efisiensi pelayanan ibu hamil.

Berdasarkan hasil analisis terhadap upaya yang telah dilakukan, faktor yang menjadi penguat/pendorong capaian, dan kelemahan tersebut di atas, maka berbagai upaya yang akan terus dilakukan untuk mempertahankan/menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Kepahiang adalah sebagai berikut:

- a. Membuat regulasi tentang pelayanan PONED di puskesmas PONED dan Non PONED;
- b. Pembuatan peraturan Bupati tentang mewajibkan keterlibatan seluruh suami dari ibu hamil, TOGA, TOMA dan seluruh stakeholder di desa dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Kepahiang.

2. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah Banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun (usia 0-11 bulan, termasuk Kematian Neonatal) pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Cara perhitungannya adalah Jumlah Kematian Bayi usia 0-11

bulan (termasuk Kematian Neonatal)/Jumlah Sasaran Kelahiran Hidup x 1.000

Tabel 3.2 di atas menunjukkan bahwa Angka kematian bayi pada tahun 2023 adalah 6,73/1.000 KH (16 bayi) melebihi target yaitu 12,22/1.000 KH. Capaian tersebut meningkat jika dibandingkan capaian tahun 2022 10,82/ 1.000 KH (26 bayi) dan telah mencapai target akhir renstra 2026 yaitu 8,04/1.000 KH dan target nasional AKB tahun 2023 adalah 17,6 / 1.000 KH.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Kepahiang diantaranya:

- a. Telah dilaksanakannya Audit Maternal Perinatal (AMP) kematian bayi untuk mencegah dan meminimalisir kematian bayi dengan penyebab yang sama;
- b. Telah diterbitkannya SK AMPSR (*Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons*) sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan audit kematian bayi;
- c. Pelayanan persalinan oleh Tenaga Kesehatan (Nakes) di Fasyankes dilakukan oleh Nakes menggunakan 6 tangan sehingga kegawatdaruratan pada Bayi Baru Lahir (BBL) bisa segera di tangani (rujuk/tangani);
- d. Kegiatan Workshop USG untuk dokter di puskesmas;
- e. Pendampingan SPOG dan SPA di puskesmas;
- f. Advokasi pemangku jabatan di tingkat kecamatan dan desa dalam memberikan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) di wilayahnya;
- g. Pelatihan bagi kader posyandu dalam memberikan edukasi pada ibu hamil;
- h. Pemberdayaan kelompok kerja operasional posyandu dalam mendukung penurunan kematian bayi.

Upaya tersebut juga didukung oleh beberapa faktor yang menjadi penguat/pendorong menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2023 di Kabupaten Kepahiang diantaranya:

- a. Meningkatnya persentase ibu bersalin di Faskes (Pf), dari 81,06% pada tahun 2022 menjadi 86,61% pada tahun 2023;
- b. Capaian persentase bayi yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada tahun 2023 sebesar 85%;
- c. Capaian persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada tahun 2023 sebesar 88,2%;
- d. Meningkatnya persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Asi Eksklusif, dari 75,31% pada tahun 2022 menjadi 79,70% pada tahun 2023;
- e. Tercapainya persentase Puskesmas yang melaksanakan intervensi kesehatan keluarga 100%.

Disamping itu terjadi peningkatan capaian dibandingkan dengan tahun 2022 tersebut didukung oleh faktor pendorong antara lain: pembinaan tenaga bidan di Puskesmas dalam mencegah kematian, pelatihan dokter dalam memantau tumbuh kembang janin, pelatihan pimpinan puskesmas untuk membuat kebijakan yang sesuai standar, dukungan pemangku jabatan tingkat kecamatan dan desa dalam memberikan KIE di wilayahnya, aktifnya kegiatan kelas ibu hamil di Posyandu, pelatihan bagi kader posyandu dalam memberikan edukasi pada ibu hamil, pemberdayaan kelompok kerja operasional posyandu dalam mendukung penurunan kematian bayi, cukupnya anggaran untuk melakukan evaluasi kematian bayi tahun lalu, serta kerjasama dengan RS dalam menindaklanjuti rujukan.

Walaupun berbagai upaya dan faktor pendorong tersebut telah berhasil menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) di

Kabupaten Kepahiang pada tahun 2023, namun masih terdapat beberapa faktor penghambat yang ditemui seperti: faktor penghambat kematian bayi dari berbagai unsur, yaitu unsur ibu hamil yang tidak memantau kehamilan secara rutin, tidak mencari informasi yang terbaik untuk kelahiran bayinya, tidak memiliki keuangan yang cukup saat kelahiran, kurang informasi, dan faktor penyakit menahun atau penyakit menular, faktor jarak pelayanan kesehatan, serta faktor 4 T (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, terlalu banyak).

Efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan dalam mendukung capaian tersebut diantaranya: 1). dengan melakukan efisiensi anggaran, dimana rata-rata persentase capaian kinerja untuk sasaran 1 ini sebesar 181,08% sedangkan penyerapan anggarannya sebesar 80,98%, sehingga diperoleh nilai efisiensi penggunaan anggaran pencapaian sasaran 1 mencapai 100,10%; 2). dukungan SDM tenaga kesehatan di puskesmas sudah bidan koodinator terlatih, 90% sudah memiliki bidan desa, 936 kader kesehataan sudah di latih KIE ibu hamil dan balita; 3). adanya beberapa memiliki ambulan desa; 4). adanya progrom UHC; 5). dukungan anggaran DAU dan DAK Non Fisik tahun anggaran 2023 dan anggaran dana desa untuk kader kesehatan dan adanya PMT balita gizi Buruk.

Berdasarkan hal tersebut, maka berbagai upaya yang perlu ditingkatkan untuk menurunkan angka kematian bayi (AKB) pada tahun 2024 diantaranya:

- a. Membentuk tim kerja posyandu untuk melakukan integrasi layanan primer sampai di tingkat desa;
- b. Mengoptimalkan AMP kematian bayi dengan melaksanakan pertemuan diseminasi AMP agar ada dukungan lintas sektor untuk menurunkan angka kematian bayi (AKB).

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Program yang Mendukung Pencapaian Sasaran
I Tahun 2023 Dibandingkan Capaian Tahun 2022 dan
Target Akhir Renstra Tahun 2026

No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2023	Realisasi			Target Akhir Tahun Renstra (2026)	Kesenjangan
						Tahun 2022	Tahun 2023	% Capaian 2023		
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan ibu, anak, dan gizi masyarakat	Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	Persen	<11.9	14.24	14.40	82.64	<11.3	-3.10
			Persentase ibu bersalin di faskes (Pf)	Persen	100	81.06	86.61	86.61	100	-13.39
			Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan Mendapat Asi Eksklusif	Persen	79.7	75.31	79.70	100.00	80	-0.30
			Prevalensi Wasting (Kurus dan Sangat Kurus) Pada Balita	Persen	4.30	2.66	2.30	186.96	3.4	-1.10
			Persentase balita dengan status gizi BB/U kurang dan sangat kurang yang meningkat berat badannya	Persen	75	N/A	77.20	102.93	90	-12.80
			Persentase Puskesmas mencapai target imunisasi rutin	Persen	92	91.2	92.60	100.65	95	-2.40
			Jumlah Kabupaten Gernas	Kabupaten	1	0	1	100.00	1	0.00
			Persentase lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	90.46	N/A	96.46	106.63	92	4.46
			Persentase Puskesmas yang melaksanakan intervensi kesehatan keluarga	Persen	100	100	100.00	100.00	100	0.00
			Persentase Standar kualitas kesehatan lingkungan	Persen	60	40	60.00	100.00	100	-40.00
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan	Persentase Posyandu Aktif	Persen	80	81.82	100.00	125.00	80	20.00

Sumber data: Dok Evaluasi Renja Bidang Binkesmas Dinkes Kab. KPH 2023.

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2023 yang Mendukung
Pencapaian Sasaran I Dibandingkan Capaian Tahun 2022
dan Target Akhir Renstra Tahun 2026

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi			Target Renstra 2026	Kesenjangan
						Tahun 2022	Tahun 2023	% Capaian 2023		
1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Terwujudnya penyediaan Layanan Kesehatan pada ibu, anak, dan gizi masyarakat	Persentase ibu hamil resti yang ditemukan dan ditangani sesuai standar	Persen	78.37	77.82	79.37	101.28	80.98	-1.61
			Persentase WUS (15-39) yang memiliki status imunisasi T2+	Persen	80	80	80	100	80	0
			Jumlah calon pengantin yang mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi	Orang	736	716	598	81.25	3790	-2476
			Persentase remaja putri yang mengkonsumsi tablet tambah darah	Persen	75	91.00	98.20	130.93	85	13.2
			Persentase ibu bersalin di puskesmas	Persen	15.11	13.53	8.65	57.25	21	-12.35
			Persentase ibu bersalin resti yang dirujuk terencana	Persen	76	75	65.20	85.79	79	-13.8
			Persentase bayi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	94.27	94	85	90.17	95.91	-10.91
			Persentase balita dengan status gizi yang diintervensi	Persen	100	100	100	100	100	0
			Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	Persen	94.02	91.20	88.2	93.81	96	-7.8
			Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat antigen baru	Persen	94.02	93.16	97.6	103.81	96	1.6
			Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan baduta	Persen	80.00	68.60	66	82.50	80	-14
			Jumlah puskesmas yang melaksanakan pembinaan ke sekolah 4 kali setahun	Puskesmas	9	7	9	100	14	-5
			Persentase anak yang mendapatkan imunisasi lanjutan lengkap di usia sekolah dasar	Persen	95	96.73	93.77	98.71	95	-1.23
			Jumlah Kampanye GERMAS	Kali	4	3	4	100	19	-12
			Jumlah Pos UKK di wilayah kerja Puskesmas yang sudah dilakukan pembentukan,	Pos UKK	26	22	26	100	40	-14

			pengawasan, dan pembinaan							
			Jumlah Pekerja Formal yang dilakukan Test kebugaran	Orang	560	343	563	100.54	1120	-214
			Jumlah skrining kesehatan yang dilakukan di Tempat kerja	Kali	55	N/A	55	100	220	-165
			Jumlah lansia beresiko (hasil screening) yang diintervensi	Orang	291		449	154.30		449
			Jumlah Pustu dan Posyandu yang menerapkan kebijakan ILP	Pustu/ Posyan du	17	N/A	17	100	121	-104
			jumlah TFU yang memenuhi standar	TFU	45	38	45	100	183	-138
			Jumlah sarana air minum dengan kualitas air minum sesuai standar	Sarana	21	N/A	14	66.67	84	-70
			Persentase RS yang melaksanakan penyelenggaraan kesehatan Lingkungan	Persen	100	100	100	100	100	0
			Jumlah desa/kelurahan SBS	Desa	70	65	81	115.71	117	-36
2	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaa n Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Re storan dan Depot Air Minum (DAM)	Meningkatny a jumlah TPP yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	Persentase TPP yang memenuhi standar	Persen	44.66		100	223.91		100
			Persentase DAMIU yang memenuhi stadar	Persen	23.07		23.07	100		23.07
3	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Meningkatny a jumlah Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang dilakukan penerbitan Stiker Pembinaan								
4	Advokasi, Pemberday aan, Kemitraan, Peningkata n Peran serta Masyaraka t dan Lintas Sektor Tingkat	Meningkatny a kemitraan lintas sektor dalam upaya penyampaia n pesan kesehatan	Jumlah Kemitraan	Kemitr aan	10	5	17	170	20	-3

	Daerah Kabupaten / Kota									
5	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatkan Edukasi Masyarakat dalam upaya promotif dan Preventif	Jumlah media Promosi Kesehatan yang dilakukan	Media	3	3	3	100	3	0
6	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat dalam Pengembangan Jejaring Kesehatan Masyarakat	Jumlah UKBM Aktif	UKBM	121	118	121	100	132	-11

Sumber data: Dok Evaluasi Renja Bidang Binkesmas dan P2 Dinkes KPH 2023.

B.2 Sasaran 2: Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat dititikberatkan pada pemenuhan nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai manifestasi dari meningkatnya pelayanan kesehatan yang diberikan, baik terhadap pelayanan Puskesmas, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, maupun Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).

Kabupaten Kepahiang memiliki 14 Puskesmas, 1 RSUD, 1 Labkesda yang merupakan UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang. Sarana Penunjang Puskesmas yang ada di Kabupaten Kepahiang terdiri dari: 31 Puskesmas Pembantu, 14 Puskesmas Keliling, 117 Poskesdes (polindes/poskesdes yang sudah mempunyai bangunan sebanyak 36), 118 Posyandu, serta didukung dengan 14 Apotik, 7 Toko Obat, 8 klinik pratama, 26 Praktek Dokter Perorangan/Gigi/Spesialis, 1 unit transfusi darah (UTD), 1 UPT

Gudang Farmasi, dan 1 unit PSC/SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu).

Akses pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepahiang juga sudah memenuhi standar, dimana setiap 1 kecamatan telah memiliki 1 s/d 3 Puskesmas. Sedangkan akses pelayanan di desa terpencil dan sangat terpencil sampai dengan tahun 2023, walaupun sudah ada pembukaan jalan menuju desa terpencil dan sangat terpencil namun belum sepenuhnya memudahkan akses pelayanan karena untuk menuju daerah tersebut masih ada daerah yang hanya bisa ditempuh dengan kendaraan roda 2 yang dimodifikasi.

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Sasaran 2: Meningkatnya
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tahun 2023 Dibandingkan
Capaian Tahun 2022 dan Target Akhir Renstra Tahun 2026

No	Sasaran 2	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2023	Realisasi			Target Akhir Tahun Renstra (2026)	Kesenjangan Terhadap Renstra	Realisasi Anggaran			Efisiensi
					Tahun 2022	Tahun 2023	% Capaian 2023			Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Persen	80	80,23	86,62	108,28	89,30	- 2,68	23,734,215,098	21,664,066,688	91.28	17,00
Jumlah							108,28					91.28	17,00

Sumber data: Dok Evaluasi Renja Bidang Yankes dan P2 Dinkes Kab. KPH 2023.

Tabel 3.5 di atas tampak bahwa capaian nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2023 sebesar 86,62% melebihi target 80% dari yang direncanakan, capaian ini meningkat jika dibandingkan capaian pada tahun 2022 sebesar 80,23%. Dari target akhir Renstra sebesar 89,30% maka masih terdapat selisih 2,68% yang harus dicapai dalam 3 tahun mendatang.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam upaya meningkatkan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diantaranya:

1. Kemudahan pelayanan, yang dilakukan dengan sistem informasi pendaftaran secara online untuk pasien BPJS (tidak mengantri lagi dalam pendaftaran);
2. Kejelasan persyaratan pelayanan; dalam hal ini sudah tersedianya alur pelayanan yang terdokumentasi dan dapat diakses oleh masyarakat, contohnya adanya Leaflet dan Banner;
3. Kecepatan pelayanan; sudah menggunakan Aplikasi *Pcare*, sehingga pelayanan lebih cepat terselesaikan;
4. Kemampuan petugas dalam memberikan informasi, tersedianya *contact center*, facebook, email, dan whatsapp sebagai media komunikasi yang digunakan dalam penyebaran informasi dan Komunikasi;
5. Kesopanan dan keramahan petugas;
6. Kenyamanan lingkungan, sarana dan prasarana serta kenyamanan ruang tunggu;
7. Pengurusan tanpa biaya, adanya program UHC (setiap masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan);
8. Kesesuaian pelayanan dengan standar pelayanan, tersedianya SOP dan alur pelayanan; serta
9. Ditanggapinya pengaduan masyarakat.

Upaya tersebut juga didukung oleh beberapa faktor yang menjadi penguat/pendorong meningkatnya nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada tahun 2023 di Kabupaten Kepahiang diantaranya:

1. Dari segi sarana, prasarana dan alat kesehatan Puskesmas, adanya upaya pemenuhan kebutuhan yang dilakukan secara konsisten oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang melalui pengadaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas,

- sehingga terpenuhinya persentase Puskesmas dengan SPA sesuai dengan standar mencapai 60% pada tahun 2023;
2. Dari segi ketenagaan di Puskesmas, meningkatnya persentase tenaga kesehatan sesuai standar dari 55% pada tahun 2022 menjadi 81,45% pada tahun 2023;
 3. Dari segi ketenagaan di Rumah Sakit, RSUD Kepahiang sudah mempunyai jenis tenaga kesehatan sesuai dengan standar;
 4. Dari segi ketersediaan obat, adanya upaya pemenuhan obat, vaksin, dan Bahan Habis Pakai (BHP) di Puskesmas melalui pengadaan tahun 2023;
 5. Dari segi pembiayaan kesehatan masyarakat, meningkatnya persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Pemerintah dari 70,69% pada tahun 2022 menjadi 155% pada tahun 2023; serta
 6. Terpenuhinya SPM Rumah Sakit.

Disamping itu terjadi peningkatan capaian dibandingkan dengan tahun 2022 tersebut disebabkan adanya penguatan pelayanan kesehatan primer (*Primary Health Care*), diantaranya:

1. Pelaksanaan re-Akreditasi 14 Puskesmas yang ada di Kabupaten Kepahiang pada tahun 2023;
2. Peningkatan SDM;
3. Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen Puskesmas;
4. Peningkatan Pembiayaan;
5. Peningkatan Sistem Informasi;

Walaupun berbagai upaya dan faktor pendorong tersebut telah berhasil meningkatkan nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten Kepahiang pada tahun 2023, namun masih terdapat berbagai faktor penghambat yang ditemui seperti pelayanan pada

pasien umum yang belum menggunakan sistem informasi secara online sehingga masih dilakukan pendaftaran secara manual.

Berdasarkan hal tersebut, maka berbagai upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian nilai survey kepuasan masyarakat pada tahun 2024 diantaranya:

1. Upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi layanan publik yang dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;
2. Pembuatan pelayanan terpadu satu pintu sebagai upaya dalam mengefektifkan pelayanan yang sederhana, mudah, dan cepat.

Capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian sasaran 2 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Program Tahun 2023 yang Mendukung
Pencapaian Sasaran II Dibandingkan Capaian Tahun 2022 dan
Target Akhir Renstra Tahun 2026

No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi			Target Akhir Tahun Renstra (2026)	Kesenjangan
						Tahun 2022	Tahun 2023	% Capaian 2023		
DINAS KESEHATAN										
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas bagi masyarakat	Persentase Puskesmas dengan SPA sesuai dengan standar	Persen	55.00	71.43	60.00	109.09	87.5	-27.50
			Persentase Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan sesuai standar	Persen	72.00	71.43	62.50	86.81	100	-37.50
		Terpenuhinya pembiayaan kesehatan pada kegiatan promotif dan preventif dalam mencapai UHC	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Pemerintah	Persen	71.00	70.69	155.00	218.31	98.50	56.50
		Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan	Persentase usia produktif yang ditindak lanjuti	Persen	89.00	88.48	78.40	88.09	90	-11.60
			Persentase penderita	Persen	10.00	N/A	13.60	136.00	18	-4.40

		penyakit tidak menular	hipertensi yang terkontrol tekanan darahnya							
			Persentase penderita diabetes melitus yang terkontrol gula darahnya	Persen	10.00	N/A	42.00	420.00	18	24.00
			Cakupan layanan upaya kesehatan jiwa masyarakat	Persen	100.00	99.10	96.20	96.20	100	-3.80
			Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC	Persen	90.00	N/A	93.40	103.78	90	3.40
			Persentase total kasus HIV yang di obati	Persen	100.00	N/A	100.00	100.00	100	0.00
			Persentase Fasyankes yang melakukan respons KLB/wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tatalaksana kasus)	Persen	40.00	N/A	40.00	100.00	70	-30.00
			Persentase Calon Jemaah Haji yang mendapatkan Rekomendasi Istithah Haji	Persen	100.00	100	100.00	100.00	100	0.00
			Persentase penyakit menular pada balita	Persen	60.00	N/A	95.10	158.50	90	5.10
			Persentase Penemuan dan pengobatan Penyakit Hepatitis	Persen	100.00	N/A	100.00	100.00	100	0.00
			Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tular Vektor dan Zoonotik	Persen	100.00	85.00	100.00	100.00	100	0.00
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Persentase tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	60.00	55%	81.45	135.75	77	4.45
			Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	79.00	71.43	63.63	80.54	100	-36.37
			Persentase Rumah Sakit dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100	0.00

3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Meningkatnya kualitas pelayanan dan sediaan kefarmasian	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) Yang Memenuhi Standar	Persen	66.67	52.17	33.33	50.00	70.37	-37.04
			Persentase pengawasan pre dan post market pangan industri rumah tangga sesuai standar	Persen	52.52	23.08	36.47	69.45	73.72	-37.25

RSUD KEPAHIANG

1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rumah Sakit dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional	Akreditasi Rumah Sakit	Persen	82	70,85	89	108,54		
2	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		89	Persen	85	91,97	89,5	105,29		

Sumber data: Dok Evaluasi Renja Bidang Yankes, P2 Dinkes Kab. KPH, dan RSUD 2023.

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2023 yang Mendukung Pencapaian Sasaran II Dibandingkan Capaian Tahun 2022 dan Target Akhir Renstra Tahun 2026

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi			Target Akhir Renstra 2026	Kesenjangan
						Tahun 2022	Tahun 2023	% Capaian 2023		
DINAS KESEHATAN										
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pelayanan kesehatan di Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang mempunyai SPA sesuai Standar	Puskesmas	11	10	9	81.82	14	-5
			Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Persen	78.57	71.43	100	127.27	100	0
			Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial	Persen	100.00	100.00	100	100	100	0

			nilai ITOR sesuai standar	Nilai	12	N/A	12	100	12	0
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan primer yang berkualitas	Jumlah Puskesmas yang memberikan Pelayanan Dasar sesuai standar	Puskesmas	6	3	7	116.67	14	-7
			Persentase puskesmas yang melakukan pelayanan Akupresure	Persen	28.60	21.40	28.6	100	71	-42.4
			Jumlah Faskes dengan jenjang Akreditasi Meningkat	Faskes	5	0	14	280	16	-2
			Persentase Pelayanan Laboratorium dasar sesuai standar	Persen	83.33	66.67	99.58	119.496	100	-0.42
			Jumlah Pembinaan Rumah Sakit dan Labkesda	Kali	2	N/A	2	100	8	-6
3	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya mutu penyedia layanan kesehatan	Persentase peningkatan mutu pelayanan faskes	Persen	57.14	100.00	100	175	100	0
			Persentase Rekomendasi Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Persen	100.00	40.00	100	100	100	0
4	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tenaga kesehatan yang memiliki izin praktik	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan rekomendasi izin praktek	Persen	550	611	448	81.45	700	-252
5	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi teknis	Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi teknis sesuai standar	Nakes	550	601	455	82.73	700	-245
6	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terwujudnya penyedia n 9 jenis tenaga yang dipersyaratkan di Puskesmas	Jumlah Puskesmas memiliki 9 Jenis Tenaga	Puskesmas	11	10	6	54.55	14	-8
7	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal,		Jumlah apotek, Toko Obat, Optikal, dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mendapat	Sarana	22	22	22	100	22	0

	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		pengawasan dan pembinaan							
8	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		persentase sarana IRT yang memenuhi ketentuan	Persen	30.77	23.08	30.77	100.00	61.54	- 30.77
9	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		persentase pangan IRT yang memenuhi syarat	Persen	75.00	0.00	33.33	44.44	91.67	- 58.34
10	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyiapan implementasi pembiayaan dan jaminan kesehatan	Jumlah Penduduk memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Peserta PBI	Jiwa	108,000	84,770	106246	98.38		106246
11	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya penyediaan Layanan Kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular	jumlah usia produktif yang memiliki faktor resiko PTM prioritas	Orang	8,106	8,533	12442	68.58	6951	-5491
			persentase penderita hipertensi yang terkendali tekanan darahnya	Persen	85.00	N/A	85	100	85	0
			persentase penderita diabetes melitus yang terkendali gula darahnya	Persen	85.00	N/A	90	105.88	85	5
			persentase penyandang gangguan jiwa yang memperoleh layanan kesehatan jiwa	Persen	80.00	98.16	99.2	124	95	4.2
			Persentase Penemuan Kasus TBC	Persen	90.00	N/A	45.8	50.89	90	-44.2
			jumlah penemuan dan pengobatan kasus baru yang ditemukan dan	Orang	10	N/A	3	30	10	-7

			diobati HIV (ODHA on ART)							
			Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi Surveilans Berbasis Digital	Persen	40.00	N/A	44.4	111	70	-25.6
			Persentase Spesimen yang adekuat	Persen	100.00	N/A	100	100	100	0
			Persentase Jemaah Haji yang mendapatkan Pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	0
			Persentase pengobatan kasus penemoni sesuai standar	Persen	100	N/A	100	100.00	100	0
			Persentase pengobatan kasus diare sesuai standar	Persen	100	N/A	100	100.00	100	0
			jumlah populasi beresiko yang dilakukan screening hepatitis B atau C	Orang	2731	N/A	1796	65.76	3997	-2201
			Jumlah kasus kusta baru tanpa cacat	Kasus	2	0	0	0	10	-10
			Persentase kabupaten yang mempunyai IR DBD ≤ 10 per 100.000 penduduk	per 100.000	10.00	N/A	52.06	19.21	10	- 42.06
			Jumlah penyakit tropis terabaikan	Puskesmas	14	N/A	14	100	14	0
			Cakupan terduga malaria yang mendapatkan pelayanan malaria	Persen	100	100	100	100.00	100	0
			Persentase Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100.00	100	0

Sumber data: Dok Evaluasi Renja Bidang Yankes & P2 Dinkes Kab. KPH 2023.

RSUD KEPAHIANG

No	Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Target 2023	Realisasi		% Capaian 2023
					Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP.	Persentase fasilitas pelayanan dan penunjang pelayanan RS tersedia sesuai standar	Persentase fasilitas pelayanan dan penunjang pelayanan RS tersedia sesuai standar	60	65.69	54	90
2	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Persentase pemenuhan standar PKRS	Persentase pemenuhan standar PKRS	90	75	100	111.11
3	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase dokumen keuangan RS yang tercapai	Persentase dokumen keuangan RS yang tercapai	100	107.28	100	100

4	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	80	79.4	100	125
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan yang tercapai	Persentase Jasa Penunjang Urusan yang tercapai	100	100	100	100
6	Peningkatan Pelayanan BLUD	Hasil evaluasi kinerja pengelolaan BLUD RS	Hasil evaluasi kinerja pengelolaan BLUD RS	100	68.98	100	100

Sumber data: Dok LAKIP RSUD Kepahiang Tahun 2023.

B.3 Sasaran 3: Meningkatnya kualitas administrasi, perencanaan dan pelaporan bidang Kesehatan.

Sasaran 3: meningkatnya kualitas administrasi, perencanaan dan pelaporan bidang kesehatan ini dimaksudkan untuk menggambarkan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang. Indikator yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran 3 ini adalah nilai SAKIP OPD.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi dalam mendisain program dan kegiatan. SAKIP juga seharusnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan *reward* dan *punishment* yang bisa dikaitkan dengan kinerja individu. Manfaat tersebut baru bisa dipetik jika ada komitmen yang kuat dari pimpinan untuk memberikan pemahaman yang kuat akan pentingnya SAKIP yang tak hanya bisa berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja tetapi juga sebagai alat pengendalian.

Capaian indikator kinerja pada sasaran 3: meningkatnya kualitas administrasi, perencanaan dan pelaporan bidang kesehatan sebagai berikut:

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran 3: Meningkatnya
Kualitas Administrasi, Perencanaan dan Pelaporan
Bidang Kesehatan Tahun 2023 Dibandingkan Capaian Tahun
2022 dan Target Akhir Renstra Tahun 2026

No	Sasaran 3	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2023	Realisasi			Target Akhir Tahun Renstra (2026)	Kesenjangan Terhadap Renstra	Realisasi Anggaran			Efisiensi
					Tahun 2022	Tahun 2023	% Capaian 2023			Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya kualitas administrasi, perencanaan dan pelaporan bidang kesehatan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	B	BB	BB	111,17	B	0	36,862,919,322	36,281,164,286	98,42	15,86
Jumlah							111,17					98,42	13,29

Sumber data: Dok Evaluasi Renja Sekretariat Dinkes Kab. KPH 2023.

Tabel 3.8 di atas terlihat bahwa capaian indikator nilai SAKIP OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang pada tahun 2023 yaitu nilai BB 78,20 dengan kategori sangat baik, melebihi target nilai B

yang direncanakan. Secara kategorik, capaian ini sama dengan capaian tahun 2022 yaitu nilai BB dengan kategori sangat baik, namun secara numerik capaian nilai SAKIP 78,20 pada tahun 2023 meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 74,26. Dari target akhir renstra tahun 2026 dengan nilai SAKIP B, maka sampai dengan tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang telah mampu melebihi capaian target akhir Renstra, untuk itu Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang mempunyai tanggungjawab yang lebih besar untuk terus mempertahankan dan meningkatkan capaian nilai SAKIP terutama sampai dengan akhir periode Renstra 2026.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam upaya meningkatkan capaian nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tahun 2023 diantaranya:

1. Mempertahankan konsistensi kesesuaian perencanaan antara dokumen RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026, Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Perjanjian Kinerja (PK), serta menggambarkan adanya korelasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra dan RPJMD;
2. Dalam perencanaan kinerja, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang telah menggunakan *Logical Framework* dan kriteria **SMART-C**: spesifik (*Specific*), dapat diukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Achievable*), memungkinkan untuk dicapai (*Realistic*), indikator dapat dicapai dalam priode waktu tertentu (*Time-bounded*), serta indikator yang mendorong peningkatan kinerja organisasi (*Continuous-Improvement*) dalam menentukan indikator Program/ kegiatan/ sub kegiatan di dalam dokumen *cascading*, Renstra, dan Renja yang ditujukan untuk mencapai

tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan, serta Misi I dan II Kepala Daerah yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Kepahiang 2021-2026;

3. Melakukan revisi *cascading* dalam upaya untuk memenuhi kriteria SMART-C dalam penentuan indikator kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan dan *Logical Framework* atau keterkaitan sebab akibat dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan;
4. Penyusunan indikator kinerja individu di dalam perjanjian kinerja telah disusun melalui proses penurunan dan penyelarasan (*cascading*) kinerja pimpinan perangkat daerah ke level pejabat eselon III, sub bagian, ketua tim kerja, sampai dengan pejabat fungsional dan staf pelaksana;
5. Dalam pengukuran kinerja, Dinas Kesehatan telah melakukan pengukuran kinerja berdasarkan PK Dinas Kesehatan, telah dilakukan dengan pengumpulan data secara berjenjang dan definisi pengukuran kinerja yang jelas, membuat laporan kinerja per triwulan yang memuat hasil capaian kinerja IKU yang sudah ditetapkan dan sudah dilakukan review terhadap capaian kinerja secara berkala;
6. Dalam pelaporan kinerja, telah memuat pencapaian kinerja serta informasi kegagalan/keberhasilan terhadap target kinerja yang direncanakan, capaian kinerja tahun sebelumnya, target akhir renstra, standar nasional (jika ada), analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang akan dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja;

7. Melakukan evaluasi internal Dinas Kesehatan secara berkala setiap Triwulan, dengan melibatkan seluruh unit kerja yang ada di Dinas Kesehatan.

Upaya tersebut juga didukung oleh beberapa faktor yang menjadi penguat/pendorong tercapainya nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang diantaranya:

1. Adanya komitmen yang tinggi dari Kepala Dinas beserta seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang untuk ikut terlibat aktif di dalam perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal yang merupakan variabel utama di dalam penyusunan dan implementasi SAKIP. Hal ini dikarenakan komitmen merupakan langkah awal dan kunci utama di dalam penerapan SAKIP;
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang secara aktif melakukan kerjasama dan koordinasi berkelanjutan dengan sektor terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Bagian Organisasi, dan Inspektorat dalam proses penyusunan dokumen SAKIP, serta secara konsisten menindaklanjuti setiap umpan balik yang diberikan oleh sektor terkait tersebut.

Disamping itu terjadi peningkatan capaian nilai SAKIP Dinas Kesehatan secara numerik dibandingkan dengan tahun 2022 tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang terhadap dokumen LKjIP tahun 2022, diantaranya: 1). Dalam hal perencanaan kinerja, Dinas Kesehatan telah menggunakan Dokumen Renstra sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran; 2). Penetapan kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala; 3). Dalam hal pengukuran kinerja, Dinas Kesehatan telah melakukan pengukuran kinerja berdasarkan PK dan IKU Dinas Kesehatan yang ditetapkan, pengumpulan data

kinerja sudah dilakukan review terhadap capaian kinerja secara berkala; dan 4). telah menggunakan pengukuran kinerja untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

Walaupun berbagai upaya dan faktor pendorong tersebut telah berhasil meningkatkan capaian nilai SAKIP Dinas Kesehatan, namun masih terdapat beberapa kendala yang ditemukan diantaranya: pengumpulan data kinerja dan evaluasi belum menggunakan suatu aplikasi berbasis elektronik, dan pencapaian kinerja pada unit kerja di Dinas Kesehatan belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*.

Efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan dalam mendukung capaian tersebut diantaranya: 1). dengan melakukan efisiensi anggaran, dimana persentase capaian kinerja untuk sasaran 3 ini sebesar 111,17% sedangkan penyerapan anggarannya sebesar 98,42%, sehingga diperoleh nilai efisiensi penggunaan anggaran pencapaian sasaran 3 mencapai 13,29%; dan 2). efisiensi terhadap SDM dan metode yang dilaksanakan, dimana dalam perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal dilakukan dengan melibatkan seluruh jajaran Dinas Kesehatan dan menggunakan metode *Brainstorming*.

Berdasarkan hasil analisis terhadap upaya yang telah dilakukan, faktor yang menjadi penguat/pendorong capaian, dan kelemahan tersebut di atas, maka berbagai upaya yang akan terus dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan konsistensi kesesuaian perencanaan antara dokumen RPJMD, Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Perjanjian Kinerja (PK);

2. Menggunakan aplikasi berbasis elektronik untuk pengumpulan data kinerja dan evaluasi;
3. Pencapaian kinerja pada unit kerja di Dinas Kesehatan akan dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*.
4. Dalam perencanaan kinerja, menggunakan *Logical Framework* dan kriteria **SMART-C**;
5. Dalam pengukuran kinerja, mengacu pada PK Dinas Kesehatan dan dilakukan pengukuran kinerja secara berkala setiap triwulan untuk mengetahui progress pencapaian target kinerja;
6. Dalam pelaporan kinerja, harus memuat pencapaian kinerja serta informasi kegagalan/keberhasilan terhadap target kinerja yang direncanakan, capaian kinerja tahun sebelumnya, target akhir renstra, standar nasional (jika ada), analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang akan dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja;
7. Melakukan evaluasi internal Dinas Kesehatan secara berkala setiap Triwulan, dengan melibatkan seluruh unit kerja yang ada di Dinas Kesehatan.
8. Mempertahankan komitmen yang tinggi dari Kepala Dinas beserta seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang untuk ikut terlibat aktif di dalam perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal;
9. Aktif melakukan koordinasi berkelanjutan dengan sektor terkait dalam proses penyusunan dokumen SAKIP, serta secara konsisten menindaklanjuti setiap umpan balik yang diberikan oleh sektor terkait tersebut.

Capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran III adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Program Tahun 2023 yang Mendukung
Pencapaian Sasaran III Dibandingkan Capaian Tahun 2022 dan
Target Akhir Renstra Tahun 2026

No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi			Target Akhir Renstra 2026	Kesenjangan
						Tahun 2022	Tahun 2023	% Capaian 2023		
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Meningkatnya kualitas manajemen dan dukungan teknis Dinas Kesehatan	Persentase dokumen SAKIP	Persen	100	100	100	100.00	100	0.00
			Persentase Dokumen Kepegawaian, Keuangan, dan Umum	Persen	100	106.53	100	100.00	100	0.00
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Terselenggaranya sistem informasi kesehatan yang berkualitas	Persentase Puskesmas dengan Pengelolaan data dan Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi	Persen	100	50	100	100.00	100	0.00

Sumber data: Dok Evaluasi Renja Sekretariat Dinkes Kab. KPH 2023.

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2023 yang Mendukung
Pencapaian Sasaran III Dibandingkan Capaian Tahun 2022 dan
Target Akhir Renstra Tahun 2026

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target 2023	Realisasi			Target Akhir Renstra 2026	Kesenjangan
						Tahun 2022	Tahun 2023	% Capaian Tahun 2023		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun secara lengkap	Dok	18	18	18	100.00	66	-48
			Persentase Dokumen Kinerja Keuangan yang berkualitas	Persen	100	100	100	100.00	1	99

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang berkualitas	Laporan	43	36	43	100.00	204	-161
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan/ pembinaan/ pengawasan dan pengendalian barang milik daerah	Dok	6	7	6	100.00	37	-31
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	90	85	100	111.11	1	99
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	Persen	100	117.29	100	100.00	100	0
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Persen	N/A	N/A	N/A		100	100
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang Dinas Kesehatan	Persen	100	100.81	100	100.00	100	0
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang perkantoran yang layak pakai	Persen	100	100	100	100.00	100	0
9	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi	Puskesmas	14	50	100	714.29	14	86

Sumber data: Dok Evaluasi Renja Sekretariat Dinkes Kab. KPH 2023.

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Sub Kegiatan Tahun 2023 yang Mendukung
Pencapaian Sasaran III Dibandingkan Capaian Tahun 2022 dan
Target Akhir Renstra Tahun 2026

No	Sub Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi			Target Akhir Renstra 2026	Kesenjangan
					Tahun 2022	Tahun 2023	% Capaian Tahun 2023		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	12	17	12	100.00	65	-53
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	9	6	100.00	33	-27
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	20	6	100.00	44	-38
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	18	18	18	100.00	90	-72
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dok	12	12	12	100.00	36	-24
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	498	484	454	91.16	801	-347
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	2	2	50.00	20	-18
8	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	4	200.00	16	-12
9	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12	0	1	8.33	127	-126

10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	34	14	34	100.00	119	-85
11	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	Dok	15	15	15	100.00	66	-51
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	13	2	100.00	23	-21
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	3	1	25.00	19	-18
14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	2	100.00	10	-8
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	0	2	100.00	5	-3
16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	0	2	100.00	7	-5
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dok	2	5	2	100.00	12	-10
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	86	22	91.67	132	-110
19	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	N/A	0		#VALUE!	3	-3
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	4	4	100.00	20	-16
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4	4	100.00	20	-16
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	5	5	83.33	6	-1
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	27	12	12	44.44	27	-15

	Dinas Operasional atau Lapangan								
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	5	5	100.00	25	-20
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	2	100.00	2	0
26	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dok	1	1	1	100.00	5	-4

Sumber data: Dok Evaluasi Renja Sekretariat Dinkes Kab. KPH 2023.

C. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2023 pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja sasaran yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepahiang. Ringkasan realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.12
Ringkasan Realisasi Anggaran dalam Mendukung Sasaran
Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang
Tahun 2023

No	Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2023	Realisasi	Persen (%)
DINAS KESEHATAN		62,182,228,720	59,228,880,946	95.25
1	Sasaran 1	1,585,094,300	1,283,649,972	80.98
2	Sasaran 2	23,734,215,098	21,664,066,688	91.28
3	Sasaran 3	36,862,919,322	36,281,164,286	98.42
RSUD KEPAHIANG		49,079,229,552	47,375,530,987	96.53
1	Mendukung Sasaran 2	49,079,229,552	47,375,530,987	96.53
Jumlah TOTAL		111,261,458,272	106,604,411,933	95.81

Sumber data: Dok Evaluasi Renja Dinkes dan LAKIP RSUD KPH 2023.

Berdasarkan tabel 3.12 di atas, jumlah realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang pada tahun 2023 yang mendukung pencapaian sasaran 1 s/d 3 sebesar Rp. 59,228,880,946,- (95,25%) dari total anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 62,182,228,720,-. Sedangkan realisasi anggaran RSUD Kepahiang pada tahun 2023 sebesar Rp. 47,375,530,987,- (96,53%) dari total anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 49,079,229,552,-. Secara rinci anggaran dan realisasi keuangan terkait pencapaian kinerja sasaran 1 s/d 3 dapat diuraikan sebagai berikut:

C.1 Anggaran dan Realisasi Keuangan Terkait Pencapaian Kinerja Sasaran 1

Anggaran dan realisasi keuangan terkait pencapaian kinerja sasaran 1 yaitu meningkatnya status kesehatan ibu, anak, dan gizi masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Anggaran dan Realisasi Keuangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Terkait Pencapaian Kinerja Sasaran 1
Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang
Tahun 2023

NO	Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
1.1	Meningkatnya status kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	1,585,094,300	1,283,649,972	80.98
1.1.1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	775,135,700	511,873,372	66.04
1.1.1.1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	775,135,700	511,873,372	66.04
1.1.1.1.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	140,709,900	2,810,000	2.00
1.1.1.1.2	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
1.1.1.1.3	Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat	121,019,000	75,233,000	62.17
1.1.1.1.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	15,700,000	-	0.00
1.1.1.1.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	5,520,000	5,420,000	98.19
1.1.1.1.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	76,381,000	33,481,872	43.84

1.1.1.1.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	17,556,800	5,230,000	29.79
1.1.1.1.8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	152,954,000	150,664,000	98.50
1.1.1.1.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	57,063,000	57,063,000	100.00
1.1.1.1.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	5,520,000	5,420,000	98.19
1.1.1.1.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga			
1.1.1.1.12	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			
1.1.1.1.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	182,712,000	176,551,500	96.63
1.1.2	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	10,590,000	10,590,000	100.00
1.1.2.1	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	10,590,000	10,590,000	100.00
1.1.2.1.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	10,590,000	10,590,000	100.00
1.1.2.2	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-	-	0.00
1.1.2.2.1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-	-	0.00
1.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	799,368,600	761,186,600	95.22
1.1.3.1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36,830,000	35,010,000	95.06
1.1.3.1.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, advokasi, kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	36,830,000	35,010,000	95.06
1.1.3.2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	61,200,000	27,600,000	45.10
1.1.3.2.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	61,200,000	27,600,000	45.10
1.1.3.3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	701,338,600	698,576,600	99.61
1.1.3.3.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	701,338,600	698,576,600	99.61

Sumber data: Dok Evaluasi Renja Dinas Kesehatan Kab. KPH 2023.

Tabel 3.13 di atas terlihat bahwa program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran 1 Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tahun 2023 sebanyak 3 program, 5 kegiatan dan 14 sub kegiatan. Anggaran yang direncanakan untuk pencapaian sasaran 1 Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang sebesar Rp. 1.585.094.300.00 sedangkan penyerapannya sebesar Rp 1.283.649.972.00 atau sebesar 80,98%.

C.2 Anggaran dan Realisasi Keuangan Terkait Pencapaian Kinerja Sasaran 2

Anggaran dan realisasi keuangan terkait pencapaian kinerja sasaran 2 yaitu meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Anggaran dan Realisasi Keuangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Terkait Pencapaian Kinerja Sasaran 2
Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang
Tahun 2023

NO	Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
1.2	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	23,734,215,098	21,664,066,688	91.28
1.2.1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	22,897,995,698	21,244,720,744	92.78
1.2.1.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5,097,995,700	4,947,100,920	97.04
1.2.1.1.1	Pembangunan Puskesmas	-		
1.2.1.1.2	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
1.2.1.1.3	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan			
1.2.1.1.4	Pengembangan Puskesmas			
1.2.1.1.5	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	150,000,000	130,428,120	86.95
1.2.1.1.6	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			

1.2.1.1.7	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1,000,000,000	994,395,162	99.44
1.2.1.1.8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan			
1.2.1.1.9	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	559,850,000	535,500,000	95.65
1.2.1.1.10	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi			
1.2.1.1.11	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	31,116,000	29,851,790	95.94
1.2.1.1.12	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di fasilitas Kesehatan	3,297,762,700	3,197,658,848	96.96
1.2.1.1.13	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	59,267,000	59,267,000	100.00
1.2.1.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	213,521,800	202,061,600	94.63
1.2.1.2.1	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya	113,103,800	111,803,600	98.85
1.2.1.2.2	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	29,668,000	27,958,000	94.24
1.2.1.2.3	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	58,370,000	50,370,000	86.29
1.2.1.2.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	12,380,000	11,930,000	96.37
1.2.1.3	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	691,455,000	502,448,026	72.67
1.2.1.3.1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	680,325,000	492,172,026	72.34
1.2.1.3.2	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	11,130,000	10,276,000	92.33
1.2.1.4	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15,953,262,398	15,091,280,650	94.60
1.2.1.4.1	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	15,953,262,398	15,091,280,650	94.60
1.2.1.5	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	941,760,800	501,829,548	53.29
1.2.1.5.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	55,359,000	34,667,400	62.62
1.2.1.5.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	40,337,000	31,167,000	77.27
1.2.1.5.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	35,300,000	29,065,000	82.34
1.2.1.5.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	33,826,000	28,234,048	83.47

1.2.1.5.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	43,920,000	29,140,000	66.35
1.2.1.5.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			
1.2.1.5.7	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah			
1.2.1.5.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	202,730,000	24,190,000	11.93
1.2.1.5.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	35,206,000	26,975,300	76.62
1.2.1.5.10	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	56,080,000	27,704,000	49.40
1.2.1.5.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	17,668,000	8,528,000	48.27
1.2.1.5.12	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	3,120,000	2,340,000	75.00
1.2.1.5.13	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
1.2.1.5.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3,360,000	-	0.00
1.2.1.5.15	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	414,854,800	259,818,800	62.63
1.2.1.5.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan malaria			
1.2.2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	763,847,400	365,055,944	47.79
1.2.2.1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	42,900,000	39,400,000	91.84
1.2.2.1.1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			
1.2.2.1.2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	42,900,000	39,400,000	91.84
1.2.2.2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	587,860,400	222,068,500	37.78
1.2.2.2.1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	587,860,400	222,068,500	37.78
1.2.2.3	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	133,087,000	103,587,444	77.83
1.2.2.3.1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
1.2.2.3.2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	34,456,000	21,741,444	63.10

1.2.2.3.3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	98,631,000	81,846,000	82.98
1.2.3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	72,372,000	54,290,000	75.02
1.2.3.1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	14,940,000	14,940,000	100.00
1.2.3.1.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	14,940,000	14,940,000	100.00
1.2.3.2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	20,440,000	20,110,000	98.39
1.2.3.2.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	20,440,000	20,110,000	98.39
1.2.3.3	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	36,992,000	19,240,000	52.01
1.2.3.3.1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	36,992,000	19,240,000	52.01

Sumber data: Dok Evaluasi Renja Dinas Kesehatan Kab. KPH 2023.

RSUD KEPAHIANG

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			
	Rencana		Realisasi	
	K	Rp	K	Rp
Tujuan : Meningkatnya nilai pelayanan publik	100	49,078,229,552	96.53	47,375,530,987
Sasaran : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	100	49,078,229,552	96.53	47,375,530,987
PROGRAM :PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	100	47,381,768,009	96.49	45,718,285,363
<u>Kegiatan</u> : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	22,357,789,659	93.79	20,969,872,799
<u>Sub Kegiatan</u> : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	19,106,250,659	94.50	18,054,861,341
<u>Sub Kegiatan</u> : Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	100	3,251,539,000	89.65	2,915,011,458

<u>Kegiatan</u> : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	255,268,000	93.17	237,835,886
<u>Sub Kegiatan</u> : Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100	255,268,000	93.17	237,835,886
<u>Kegiatan</u> : Admistrasi umum perangkat daerah	100	431,566,500	97.33	420,052,172
<u>Sub.Kegiatan</u> : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	154,226,500	96.85	149,375,286
<u>Sub.Kegiatan</u> : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	277,340,000	97.60	270,676,886
<u>Kegiatan</u> : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	670,143,850	99.84	669,055,000
<u>Sub Kegiatan</u> : Pengadaan Mebel	100	67,643,850	99.97	67,625,000
<u>Sub Kegiatan</u> :Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	602,500,000	99.82	601,430,000
<u>Kegiatan</u> : Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	667,000,000	79.34	529,175,658
<u>Sub Kegiatan</u> : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	100	667,000,000	79.34	529,175,658
<u>Kegiatan</u> : Peningkatan Pelayanan BLUD	100	23,000,000,000	99.53	22,892,293,848
<u>Sub Kegiatan</u> : Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	100	23,000,000,000	99.53	22,892,293,848
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100	1,696,461,543	97.69	1,657,245,624
<u>Kegiatan</u> : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100	1,446,461,443	98.65	1,426,900,282
<u>Sub Kegiatan</u> : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100	431,484,186	98.96	427,001,500
<u>Sub Kegiatan</u> : Pengadaan Obat, Vaksin	100	707,977,257	98.26	695,657,482
<u>Sub Kegiatan</u> : Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100	307,000,000	99.10	304,241,300
<u>Kegiatan</u> : Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kab/kota	90	250,000,100	92.14	230,345,342
<u>Sub Kegiatan</u> : Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di kab/kota	100	250,000,100	92.14	230,345,342
TOTAL		49,078,229,552	96.53	47,375,530,987

Sumber data: Dok LAKIP RSUD Kepahiang 2023.

Tabel 3.14 di atas terlihat bahwa program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran 2 Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tahun 2023 sebanyak 3 program, 9 kegiatan dan 32 sub kegiatan. Anggaran yang direncanakan untuk pencapaian sasaran 2 Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang sebesar Rp. 23.734.215.098.00 sedangkan penyerapannya sebesar Rp 21.664.066.688.00 atau

sebesar 91,28%. Sedangkan anggaran RSUD Kepahiang yang direncanakan untuk pencapaian sasaran 2 Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang sebesar Rp. 49.078.229.552.00 dengan penyerapannya sebesar Rp 47.375.530.987.00 atau sebesar 96,53%.

C.3 Anggaran dan Realisasi Keuangan Terkait Pencapaian Kinerja Sasaran 3

Anggaran dan realisasi keuangan terkait pencapaian kinerja sasaran 3 yaitu meningkatnya kualitas administrasi, perencanaan dan pelaporan bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15
Anggaran dan Realisasi Keuangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Terkait Pencapaian Kinerja Sasaran 3
Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang
Tahun 2023

NO	Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
1.3	Meningkatnya kualitas administrasi, perencanaan dan pelaporan bidang kesehatan	36,862,919,322	36,281,164,286	98.42
1.3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36,777,079,322	36,206,448,618	98.45
1.3.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	464,914,000	447,358,000	96.22
1.3.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	187,222,000	173,087,000	92.45
1.3.1.1.1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39,132,000	35,711,000	91.26
1.3.1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	238,560,000	238,560,000	100.00
1.3.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34,009,109,422	33,669,521,056	99.00
1.3.1.2.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			
1.3.1.2.2	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
1.3.1.2.3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34,009,109,422	33,669,521,056	99.00
1.3.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	65,440,000	65,440,000	100.00
1.3.1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24,980,000	24,980,000	100.00

1.3.1.3.2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	40,460,000	40,460,000	100.00
1.3.1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	270,761,000	188,141,000	69.49
1.3.1.4.1	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	39,500,000	39,500,000	100.00
1.3.1.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	194,307,000	120,807,000	62.17
1.3.1.4.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	36,954,000	27,834,000	75.32
1.3.1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,507,856,900	1,377,757,900	91.37
1.3.1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	83,306,000	83,298,500	99.99
1.3.1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	977,492,400	854,292,400	87.40
1.3.1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	66,500,000	66,500,000	100.00
1.3.1.5.4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	184,208,000	181,279,000	98.41
1.3.1.5.5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
1.3.1.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17,322,500	17,160,000	99.06
1.3.1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	179,028,000	175,228,000	97.88
1.3.1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	
1.3.1.6.1	Pengadaan Mebel			
1.3.1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91,600,000	91,349,662	99.73
1.3.1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11,200,000	11,200,000	100.00
1.3.1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80,400,000	80,149,662	99.69
1.3.1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	367,398,000	366,881,000	99.86
1.3.1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	134,580,000	134,150,000	99.68
1.3.1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74,500,000	74,413,000	99.88
1.3.1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33,980,000	33,980,000	100.00
1.3.1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	124,338,000	124,338,000	100.00
1.3.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	85,840,000	74,715,668	87.04
1.3.2.1	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	85,840,000	74,715,668	87.04
1.3.2.1.1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	85,840,000	74,715,668	87.04

Sumber data: Dok Evaluasi Renja Dinas Kesehatan Kab. KPH 2023.

Tabel 3.15 di atas terlihat bahwa program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran 3 Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tahun 2023 sebanyak 2 program, 9 kegiatan dan 25 sub kegiatan. Anggaran yang direncanakan untuk pencapaian sasaran 3 sebesar Rp. 36.862.919.322.00 sedangkan penyerapannya sebesar Rp 36.281.164.286.00 atau sebesar 98,42%.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang merupakan laporan kinerja tahun kedua atas pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang. Laporan akuntabilitas kinerja ini melaporkan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang.

Pengukuran kinerja *outcome*, rata-rata tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tahun 2023 sebesar **156,81% (Sangat Tinggi)** dan rata-rata tingkat capaian indikator kinerja sasaran sebesar **145,54% (Sangat Tinggi)** dari 4 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tahun 2023. Dari 4 indikator tersebut, seluruhnya (100,00%) melebihi/melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2023.

Sementara itu berdasarkan pengukuran kinerja keuangan, rata-rata capaian kinerja keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 sebesar **95,25% (Sangat Tinggi)** dan capaian kinerja keuangan RSUD Kepahiang sebesar **96,53% (Sangat Tinggi)**. Dari 3 (tiga) sasaran strategis Dinas Kesehatan, sebanyak 2 sasaran capaian kinerja keuangannya kategori sangat tinggi dan 1 sasaran dengan kategori tinggi.

Berdasarkan hasil analisis terhadap upaya yang telah dilakukan, faktor yang menjadi penguat/pendorong capaian, dan kelemahan atau faktor penghambat yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, maka solusi/strategi yang direkomendasikan untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sasaran strategis Dinas Kesehatan pada tahun-tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH
 - a. Membuat regulasi tentang pelayanan PONED di puskesmas PONED dan Non PONED;
 - b. Pembuatan peraturan Bupati tentang mewajibkan keterlibatan seluruh suami dari ibu hamil, TOGA, TOMA dan seluruh stakeholder di desa dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Kepahiang.
2. Upaya Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB)
 - a. Membentuk tim kerja posyandu untuk melakukan integrasi layanan primer sampai di tingkat desa;
 - b. Mengoptimalkan Audit Maternal Perinatal (AMP) kematian bayi dengan melaksanakan pertemuan diseminasi AMP agar ada dukungan lintas sektor untuk menurunkan angka kematian bayi (AKB).
3. Upaya meningkatkan nilai Survei Kepuasan Masyarakat
 - a. Meningkatkan kualitas dan inovasi layanan publik yang dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;
 - b. Pembuatan pelayanan terpadu satu pintu sebagai upaya dalam mengefektifkan pelayanan yang sederhana, mudah, dan cepat.
4. Upaya meningkatkan Nilai SAKIP Dinas Kesehatan
 - a. Mempertahankan konsistensi kesesuaian perencanaan antara dokumen RPJMD, Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Perjanjian Kinerja (PK);

- b. Menggunakan aplikasi berbasis elektronik untuk pengumpulan data kinerja dan evaluasi;
- c. Pencapaian kinerja pada unit kerja di Dinas Kesehatan akan dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*.
- d. Dalam perencanaan kinerja, menggunakan *Logical Framework* dan kriteria **SMART-C**;
- e. Dalam pengukuran kinerja, mengacu pada PK Dinas Kesehatan dan dilakukan pengukuran kinerja secara berkala setiap triwulan untuk mengetahui progress pencapaian target kinerja;
- f. Dalam pelaporan kinerja, harus memuat pencapaian kinerja serta informasi kegagalan/keberhasilan terhadap target kinerja yang direncanakan, capaian kinerja tahun sebelumnya, target akhir renstra, standar nasional (jika ada), analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang akan dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja;
- g. Melakukan evaluasi internal Dinas Kesehatan secara berkala setiap Triwulan, dengan melibatkan seluruh unit kerja yang ada di Dinas Kesehatan.
- h. Mempertahankan komitmen yang tinggi dari Kepala Dinas beserta seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang untuk ikut terlibat aktif di dalam perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal;
- i. Aktif melakukan koordinasi berkelanjutan dengan sektor terkait dalam proses penyusunan dokumen SAKIP, serta secara konsisten menindaklanjuti setiap umpan balik yang diberikan oleh sektor terkait tersebut.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tahun 2023 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang selaku penerima amanah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Kepahiang.

DITETAPKAN DI : KEPAHIANG
PADA TANGGAL : 10 Januari 2024
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEPAHIANG,



Dr. TAJRI FAUZAN, SKM., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197001271989031001



Lampiran



Lampiran I

**Perjanjian Kinerja Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Kepahiang
Tahun 2023**



**PERJANJIAN
KERJA
TAHUN 2023
DINKESKPH**

2023





PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS KESEHATAN

Jalan Bhakti Husada No.06 Pasar Ujung, Kepahiang
Email : dinkeskabkepahiang@gmail.com, web :
www.dinkeskepahiang.com

KEPAHIANG - 39372



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Tajri Fauzan, SKM., M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Hidayattullah Sjahid, MM., IPU

Jabatan : Bupati Kepahiang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepahiang, Juni 2023

Pihak Kedua
BUPATI KEPAHIANG,

Dr. Ir. HIDAYATTULLAH SJAHD, MM., IPU

Pihak Pertama
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEPAHIANG



H. TAJRI FAUZAN, SKM., M.Si
NIP. 197001271989031001



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS KESEHATAN

Jalan Bhakti Husada No.06 Pasar Ujung, Kepahiang
Email : dinkeskabkepahiang@gmail.com, website :
www.dinkeskepahiang.com



KEPAHIANG – 39372

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

OPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	12,22
		Angka kematian Ibu per 100.000 Kelahiran hidup	152
2	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	80
3	Meningkatnya kualitas administrasi, perencanaan dan pelaporan bidang kesehatan	Nilai Sakip OPD	B

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	76.667.184.774
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	17.886.225.898
3	Program Peningkatan Kapsitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	763.847.400
4	Program Sediaan Farmasi. Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	82.962.000
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	799.368.600
Jumlah		96.199.588.672

Kepahiang, Juni 2023

Pihak Kedua
BUPATI KEPAHIANG,

Dr. Ir. HIDAYATTULLAH SJAHD, MM., IPU

Pihak Pertama
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEPAHIANG



TAJRI FAUZAN, SKM., M.Si
NIP. 197001271989031001



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG
DINAS KESEHATAN

Jalan Bhakti Husada No.06 Pasar Ujung, Kepahiang
Email : dinkeskabkepahiang@gmail.com, web :
www.dinkeskepahiang.com

KEPAHIANG - 39372



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

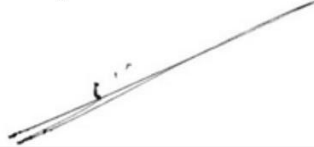
Nama : Yudi Susanto, SKM
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan
Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : H. Tajri Fauzan, SKM., M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Kesehatan,


H. TAJRI FAUZAN, SKM., M.Si
Pembina Tk 1
NIP. 19731203 199402 1 005

Kepahiang, Februari 2023
Pihak Pertama
Sekretaris,


YUDI SUSANTO, SKM
NIP. 19731203 199402 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS KESEHATAN

Jalan Bhakti Husada No.06 Pasar Ujung, Kepahiang

Email : dinkeskabkepahiang@gmail.com, web :

www.dinkeskepahiang.com

KEPAHIANG - 39372



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

OPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang

Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas Manajemen dan dukungan teknis Dinas Kesehatan	Persentase Dokumen Anggaran dan Kinerja	100%
		Persentase Dokumen Kepegawaian, Keuangan dan Umum	100%
2.	Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan yang berkualitas	Persentase Puskesmas dengan sistem Informasi Kesehatan berkualitas	100%

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 441.122.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 33.546.090.316
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 65.440.000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 364.477.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.408.261.400
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp. 131.200.000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 265.690.000
8	Penyelenggaraan system informasi kesehatan	Rp. 151.450.000,-
Jumlah		Rp. 35.475.903.409,-

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Kesehatan,

H. TAJRI FAUZAN, SKM., M.Si

Pembina Tk 1

NIP. 19731203 199402 1 005

Kepahiang, Februari 2023

Pihak Pertama

Sekretaris,

YUDI SUSANTO, SKM

NIP. 19731203 199402 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS KESEHATAN

Jalan Bhakti Husada No.06 Pasar Ujung, Kepahiang
Email : dinkeskabkepahiang@gmail.com, web :
www.dinkeskepahiang.com



KEPAHIANG - 39372

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ester Dwi Sastika, S. Kep
Jabatan : Kabid Bina Kesehatan Masyarakat
Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : H. Tajri Fauzan, SKM., M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Kesehatan,

H. TAJRI FAUZAN, SKM., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19700127 198903 1 001

Kepahiang, Februari 2023
Pihak Pertama
Kepala Bidang Binkesmas

ESTER DWI SASTIKA, S. Kep
NIP. 19870904 201001 2 014



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS KESEHATAN

Jalan Bhakti Husada No.06 Pasar Ujung, Kepahiang
Email : dinkeskabkepahiang@gmail.com, web :
www.dinkeskepahiang.com



KEPAHIANG – 39372

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

OPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif dan preventif pada setiap siklus kehidupan yang didukung oleh peningkatan tata kelola kesehatan masyarakat	Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis Persentase Ibu Bersalin di Faskes Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan Mendapat Asi Eksklusif Prevalensi Wasting (Kurus dan Sangat Kurus) Kabupaten Germas Persentase peningkatan tingkat kemandirian pada lansia Persentase Standar kualitas kesehatan lingkungan Persentase Posyandu Aktif	<11,9% 100% 79,7% 4,3% 1 45 % 60% 80%
2.	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota sehat	Persentase standar kualitas kesehatan lingkungan	60 %

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 881.654.700,-
2	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 36.830.000,-
3	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 61.200.000,-
4	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 701.338.600,-
5	Penerbitan Sertifikat Laik Higine Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Rp. 10.590.000,-
Jumlah		Rp. 1.691.613.300,-

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Kesehatan,

H. TAJRI FAUZAN, SKM., M.Si
Pembina Tk 1
NIP. 19700127 198903 1 001

Kepahiang, Februari 2023
Pihak Pertama
Kepala Bidang Binkesmas

ESTER DWI SASTIKA, S. Kep
NIP. 19870904 201001 2 014



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS KESEHATAN

Jalan Bhakti Husada No.06 Pasar Ujung, Kepahiang

Email : dinkeskabkepahiang@gmail.com, web :

www.dinkeskepahiang.com

KEPAHIANG - 39372



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rospan Efendi, SKM
Jabatan : Kabid Yankes dan SDK
Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : H. Tajri Fauzan, SKM., M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua,

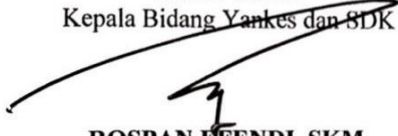
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Kesehatan,


H. TAJRI FAUZAN, SKM., M.Si
Pembina Tk 1
NIP. 19731203 199402 1 005

Kepahiang, Februari 2023
Pihak Pertama
Kepala Bidang Yankes dan SDK


ROSPAN EFENDI, SKM
NIP. 196804191989031002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG

DINAS KESEHATAN

Jalan Bhakti Husada No.06 Pasar Ujung, Kepahiang
Email : dinkeskabkepahiang@gmail.com, web : www.dinkeskepahiang.com

KEPAHIANG - 39372



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

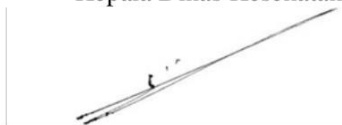
OPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas bagi masyarakat	Persentase fasyankes yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	55%
		Persentase Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan sesuai standar	72%
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek, Toko Obat, Optik & UMOT) Yang Memenuhi Standar	66,67%
		Persentase pengawasan pre dan post market pangan industri rumah tangga sesuai standar	52,52%
2	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Persentase tenaga kesehatan sesuai standar	60%
		Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	79%
		Persentase Rumah Sakit dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100%
3	Terpenuhinya pembiayaan kesehatan pada kegiatan promotif dan preventif dalam mencapai UHC	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Pemerintah	71%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3,147,186,900
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9,604,649,418
3	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	335,925,000
4	Pemberian izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	42,900,000
5	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan	34,456,000
6	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	14,940,000

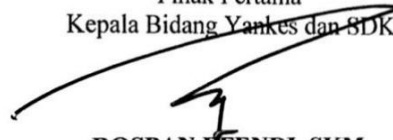
7	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk	20,440,000
8	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	36,992,000
9	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	587,860,000
	JUMLAH	13,825,349,318

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Kesehatan,



H. TAJRI FAUZAN, SKM., M.Si
Pembina Tk 1
NIP. 19731203 199402 1 005

Kepahiang, Februari 2023
Pihak Pertama
Kepala Bidang Yankes dan SDK



ROSPAN EFENDI, SKM
NIP. 196804191989031002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS KESEHATAN

Jalan Bhakti Husada No.06 Pasar Ujung, Kepahiang
Email : dinkeskabkepahiang@gmail.com, website : www.dinkeskepahiang.com
KEPAHIANG— 39372



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wisnu Irawan, S.Kep
Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : H.Tajri Fauzan, SKM,M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua,

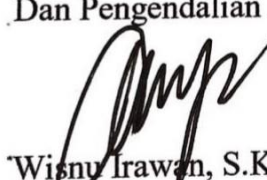
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kepahiang


H.Tajri Fauzan,SKM,M.Si
Pembina TK.I
Nip.19700127 198903 1 001

Kepahiang, Februari 2023
Pihak Pertama
Kepala Bidang Pencegahan
Dan Pengendalian Penyakit


Wisnu Irawan, S.Kep
Nip. 19781225 200604 1 007

Lampiran : Perjanjian Kinerja antara
Kepala Bidang Dengan Kepala Dinas Kesehatan
Nomor :
Tanggal : Januari 2023

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

OPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
1.	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	Persentase Puskesmas mencapai target imunisasi rutin	92 %
2.	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan Penyakit Tidak Menular (PTM)	Persentase usia produktif yang ditindak lanjuti	89%
		Prevalensi Hipertensi	34,00%
		Prevalensi Diabetes Melitus	1%
		Cakupan layanan upaya kesehatan jiwa masyarakat	100%
		Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC	90%
		persentase total kasus HIV yang di obati	100%
		Persentase Fasyankes yang melakukan respons KLB/wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tatalaksana kasus)	40%
		Persentase Calon Jemaah Haji yang mendapatkan Rekomendasi Istithah Haji	100%
		Persentase penyakit menular pada balita	70%
		Persentase Penemuan dan pengobatan Penyakit Hepatitis	100%
		Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tular Vektor dan Zoonotik	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.243.261.800

Pihak Kedua
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kepahiang


H. Tajri Fauzan, SKM, M.Si
Pembina TK.I
Nip.19700127 198903 1 001

Kepahiang, Februari 2023
Pihak Pertama
Kepala Bidang Pencegahan
Dan Pengendalian Penyakit


Wisnu Irawan, S.Kep
Nip. 19781225 200604 1 007



Lampiran II

***Cascading* Rencana Kerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Kepahiang
Tahun 2023**

Cascading Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang
Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran Kada/Sasaran OPD/Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Kada/Sasaran OPD/Program	Target	Nilai Anggaran	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Nilai Anggaran	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Satuan	Target	Nilai Anggaran
				2023					2023					2023	
A	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Angka Harapan Hidup (AHH)	68.17	62,182,228,720										
1	Meningkatnya status kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat		1. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	152	1,585,094,300										
			2. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	12.22											
1)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas kesehatan ibu, anak, dan gizi masyarakat	Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	<11,9%	775,135,700	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pelayanan Layanan Kesehatan pada ibu, anak, dan gizi masyarakat	Persentase ibu hamil resti yang ditemukan dan ditangani sesuai standar	78.37%	775,135,700	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	orang	2614	140,709,900
								Persentase WUS (15-39) yang memiliki status imunisasi T2+	80%						
								Jumlah calon pengantin yang mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi	736		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	N/A	
								Persentase remaja putri yang mengkonsumsi tablet tambah darah	75%		Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pelayanan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	4	121,019,000
			Persentase ibu bersalin di faskes (Pf)	100%				Persentase ibu bersalin di puskesmas	15.11%		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terkelolanya Pelayanan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	orang	2495	15,700,000

								Persentase ibu bersalin resti yang dirujuk terencana	76%						
			Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan Mendapat Asi Eksklusif	79,7%				Persentase bayi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	94.27%		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	orang	2247	5,520,000
			Prevalensi Wasting (Kurus dan Sangat Kurus) Pada Balita	4.3%				Persentase balita dengan status gizi yang diintervensi	100%		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Balita	9144	76,381,000
			Persentase balita dengan status gizi BB/U kurang dan sangat kurang yang meningkat berat badannya	75.00%											
			Persentase imunisasi rutin yang mencapai target di Puskesmas	92				1. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	94.02						
								3. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat antigen baru	94.02						
								4. Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan	80.00						
			Jumlah Kabupaten Gernas	1				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pembinaan ke sekolah 4 kali setahun	9		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	orang	20589	17,556,800
								Persentase anak yang mendapatkan imunisasi lanjutan lengkap di usia sekolah dasar	95						
								Jumlah Kampanye GERMAS	4		Pengelolaan Pelayanan	Terlaksananya Pengelolaan	Doku men	4	152,954,000

											Promosi Kesehatan	Pelayanan Promosi Kesehatan			
								Jumlah Pos UKK di wilayah kerja Puskesmas yang sudah dilakukan pembentukan, pengawasan, dan pembinaan	26		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Doku men	2	57,063,000
								Jumlah Pekerja Formal yang dilakukan Test kebugaran	560						
								Jumlah skrining kesehatan yang dilakukan di Tempat kerja	55						
			Persentase lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan	90,46 %				Jumlah lansia dengan tingkat kemandirian A (mandiri)	12.225		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Orang	15297	5,520,000
			Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Integrasi Layanan Primer (ILP)	N/A				Jumlah Pustu dan Posyandu yang menerapkan kebijakan ILP	17		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Orang	2,553	
			Persentase Standar kualitas kesehatan lingkungan	60%				Jumlah TFU yang memenuhi standar	45		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Doku men	4	
								Jumlah sarana air minum dengan kualitas air minum sesuai standar	21		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Doku men	3	182,712,000
								Persentase RS yang melaksanakan penyelenggaraan kesehatan Lingkungan	100						
								Jumlah desa/ kelurahan SBS	70						
2)	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya Tempat Pengelolaa n Pangan (TPP)	Persentase TPP yang memenuhi standar	N/A	10,590,000	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa	Meningkatnya jumlah TPP yang memiliki Sertifikat Laik	Jumlah TPP yang memiliki sertifikat laik higine sanitasi	20	10,590,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik	Doku men	2	10,590,000

	Kesehatan Masyarakat		Masyarakat (SKM)												
1)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas bagi masyarakat	Persentase Puskesmas dengan SPA sesuai dengan standar	55%	6,002,972,500	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang mempunyai SPA sesuai Standar	11	5,097,995,700	Pembangunan Puskesmas	Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Unit	1	
											Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	0	
											Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Unit	1	
											Pengembangan Puskesmas	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	1	
											Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Unit	0	150,000,000
											Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Unit	2	
											Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	8	1,000,000,000
											Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit	1	

											Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	3	559,850,000
											Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/ Regional Maintainance Center	Unit	135	
											Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Unit	14	31,116,000
								Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	78.57		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di fasilitas Kesehatan	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Paket	26	3,297,762,700
								Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial	100.00						
								nilai ITOR sesuai standar	12		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	paket	12	59,267,000
			Persentase Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan sesuai standar	72.00%		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Meningkatnya akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Puskesmas yang memberikan Pelayanan Dasar sesuai standar	6	213,521,800	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	N/A	113,103,800

						Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	primer yang berkualitas	Jumlah Puskesmas yang memberikan Pelayanan rujukan sesuai standar	N/A		Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Unit	6	29,668,000
										Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1	58,370,000	
								Persentase puskesmas yang melakukan pelayanan Akupresure		28.60%		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Doku men	1	12,380,000
								Jumlah Faskes dengan jenjang Akreditasi Meningkat		5		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	Unit	16	
								Persentase Pelayanan Laboratorium dasar sesuai standar		83.33					
								Jumlah Pembinaan Rumah Sakit dan Labkesda		2					
								Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Meningkatnya mutu penyedia layanan kesehatan	Persentase peningkatan mutu pelayanan faskes	57.14	691,455,000	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran

						Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Indikator Nasional Mutu (INM)				
							Persentase Rekomendasi Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	100.00			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	unit	10	11,130,000
		Terpenuhi nya pembiayaan kesehatan pada kegiatan promotif dan preventif dalam mencapai UHC	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Pemerintah	71.00%	15,953,262,398	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksana nya penyiapan implementasi pembiayaaa n dan jaminan kesehatan	Persentase validitas peserta JKN	N/A	15,953,262,398	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Doku men	1	15,953,262,398
		Meningkat nya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular	Persentase usia produktif yang ditindak lanjuti	89%	941,760,800	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya penyediaan Layanan Kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular	Jumlah usia produktif yang memiliki faktor resiko PTM prioritas	8,106	941,760,800	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Orang	94,437	55,359,000
	Persentase penderita hipertensi yang terkendali tekanan darahnya		10.00%					Persentase penyandang hipertensi yang ditindak lanjuti	85%		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Orang	37,385	40,337,000
	Persentase penderita diabetes melitus yang terkendali gula darahnya		10.00%					Persentase penyandang diabetes melitus yang ditindak lanjuti	85%		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Orang	1,146	35,300,000
	Cakupan layanan upaya kesehatan jiwa masyarakat		100%					Persentase penyandang gangguan jiwa yang memperoleh layanan kesehatan jiwa	80%		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	266	33,826,000
											Pengelolaan Pelayanan	Terlaksananya Pelayanan	Orang	132	43,920,000

											Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)			
											Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Orang	1	
											Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Orang	6102	
			Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC	90%				Persentase Penemuan Kasus TBC	90%		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Orang	4770	202,730,000
			Persentase total kasus HIV yang di obati	100%				Jumlah penemuan dan pengobatan kasus baru yang ditemukan dan diobati HIV (ODHA on ART)	10		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Orang	3215	35,206,000
			Persentase Fasyankes yang melakukan respons KLB / wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tatalaksana kasus)	40%				Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi Surveilans Berbasis Digital	40%		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Doku men	3	56,080,000
								Persentase Spesimen yang adekuat	100%		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Doku men	1	17,668,000
											Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium	Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Spesim en	10	3,120,000

											Rujukan/Nasional				
											Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	2	
											Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	1	3,360,000
			Persentase Calon Jemaah Haji yang mendapatkan Rekomendasi Istitohah Haji	100				Persentase Jemaah Haji yang mendapatkan Pelayanan kesehatan sesuai standar	100						
			Persentase penyakit menular pada balita	60%				Persentase pengobatan kasus penemoni sesuai standar	100		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	7	414,854,800
							Persentase pengobatan kasus diare sesuai standar	100							
			Persentase Penemuan dan pengobatan Penyakit Hepatitis	100%			Jumlah popupasi beresiko yang dilakukan screening hepatitis B atau C	2731							
							Jumlah kasus kusta baru tanpa cacat	2							
			Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tular Vektor dan Zoonotik	100%			Insiden Rate (IR) DBD per 100.000 penduduk	< 10 per 100.000							
							Jumlah penyakit tropis terabaikan	14							
							Persentase Gigitan Hewan	100							

								Penular Rabies (GHPR) yang ditindaklanjuti							
								Cakupan terduga malaria yang mendapatkan pelayanan malaria	100		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan malaria	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Orang	N/A	
2)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Persentase tenaga kesehatan sesuai standar	60%	763,847,400	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tenaga kesehatan yang memiliki izin praktik	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan rekomendasi ijin praktek	550	42,900,000	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	50	
											Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	100	42,900,000
									550	587,860,400	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	50	587,860,400
			Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	79%		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terwujudnya tenaga kesehatan yang dipersyaratkan di Puskesmas	Jumlah Puskesmas memiliki 9 Jenis Tenaga	11	133,087,000	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	
			Persentase Rumah Sakit dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100							Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	120	34,456,000
											Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	2	98,631,000
3)	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT	Meningkatnya kualitas	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian	66.67	72,372,000	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan	Terwujudnya apotek dan Toko Obat yang	Jumlah apotek dan Toko Obat yang mendapat	22	14,940,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	Dokumen	2	14,940,000

	KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	pelayanan dan sediaan kefarmasian	(Apotek dan Toko Obat) Yang Memenuhi Standar			Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	mendapat pengawasan dan pembinaan	pengawasan dan pembinaan			Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			
		Meningkatnya kualitas keamanan pangan industri Rumah Tangga	Persentase pengawasan pre dan post market pangan industri rumah tangga sesuai standar	52.52		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terwujudnya sarana IRT yang memenuhi ketentuan	Persentase sarana IRT yang memenuhi ketentuan	30.77	20,440,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	2	20,440,000
						Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terwujudnya pangan IRT yang memenuhi syarat	Persentase pangan IRT yang memenuhi syarat	75.00	36,992,000	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	12	36,992,000
3	Meningkatnya kualitas administrasi, perencanaan dan pelaporan bidang kesehatan		Nilai Sakip OPD	B	36,862,919,322										
1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas manajemen dan dukungan teknis	Persentase dokumen SAKIP	100%	36,777,079,322	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun secara lengkap	18	464,914,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	187,222,000
											Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	39,132,000

		Dinas Kesehatan	Persentase Dokumen Kepegawaian, Keuangan, dan Umum	100			perangkat daerah	Persentase Dokumen Kinerja Keuangan yang berkualitas	100%		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	238,560,000
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang berkualitas	43	34,009,109,422	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	
											Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	12	
											Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	498	34,009,109,422
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan/pembinaan/pengawasan dan pengendalian barang milik daerah	6	65,440,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	24,980,000
											Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	40,460,000
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90%	270,761,000	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	12	39,500,000
											Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Orang	34	194,307,000

											Perundang-Undangan	Perundang-Undangan			
											Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	15	36,954,000
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100	1,507,856,900	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	paket	2	83,306,000
											Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	paket	4	977,492,400
											Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	paket	2	66,500,000
											Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	2	184,208,000
											Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Paket	2	
											Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	2	17,322,500
											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	179,028,000
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	N/A		Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Unit	N/A	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase penyediaan jasa penunjang Dinas Kesehatan	100	91,600,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	11,200,000
											Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	4	80,400,000

							Pemerintah an Daerah										
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksana nya Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang perkantoran yang layak pakai	100	367,398,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	6	134,580,000		
											Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	27		74,500,000	
												Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	5			33,980,000
												Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	2			124,338,000
2)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terselengg aranya sistem informasi kesehatan yang berkualitas	Persentase Puskesmas dengan Pengelolaan data dan Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi	100%	85,840,000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Terselengga ranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	Jumlah Puskesmas yang menyelenggaraka n Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi	14	85,840,000	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Doku men	1	85,840,000		
TOTAL ANGGARAN					62,182,228,720					62,182,228,720					62,182,228,720		